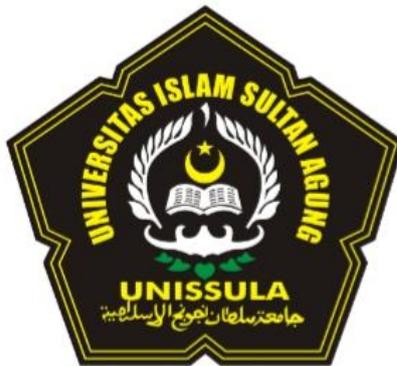


PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor makanan serta minuman Yang Terdaftar di BEI periode 2020-2022)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

Ella Novitasari

NIM: 31402000060

PROGAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Disusun Oleh:
Ella Novitasari
NIM : 31402000060

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian skripsi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 20 Agustus 2024
Pembimbing



Sutapa, SE., M.Si., Akt
NIK. 211496007

“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”

Disusun Oleh :

ELLA NOVITASARI

NIM : 31402000060

Telah dipertahankan di depan penguji

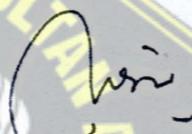
Pada tanggal 28 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

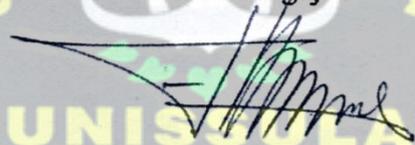
Dosen Pembimbing

Dosen Penguji 1


Sutapa, SE., M.Si., Akt.
NIK. 211496007


Dr. Lisa Kartikasari, SE., M.Si, Ak., CA
NIK. 211402010

Dosen Penguji 2


Drs. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak.CA
NIK. 210493034

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 28 Agustus 2024

Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ella Novitasari

NIM : 31402000060

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi, Universitas

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini saya menyatakan skripsi dengan judul :

“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiat skripsi orang lain, seluruh isi dari skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan seharusnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 28 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Ella Novitasari
NIM: 31402000060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya”- Sutan Sjahir

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan untuk :

Bapak, Ibu dan Adik saya tercinta, yang selalu menjadi support system terbesar dalam hidup saya, yang selalu mendoakan saya, yang selalu jadi garda terdepan untuk saya,

Serta sahabat dan teman teman saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor makanan serta minuman yang Tedaftar di BEI Periode 2020-2022)

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan buat mengidentifikasi pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Populasi penelitian ialah perusahaan sub sektor makanan serta minuman terdaftar di BEI periode 2020-2022. Metode penentuan sampel memakai purposive sampling berdasarkan karakteristik khusus yang sesuai kriteria yang sudah ditetapkan, dan kemudian didapat sampel sejumlah 32 perusahaan dengan 3 tahun penelitian jadi ada 96 data penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan jika, kepemilikan institusional berdampak positif pada *tax avoidance*, dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*, profitabilitas tidak bisa memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional pada *tax avoidance*, namun profitabilitas bisa memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen pada *tax avoidance*.

Kata kunci : *corporate governance*, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, *tax avoidance*.

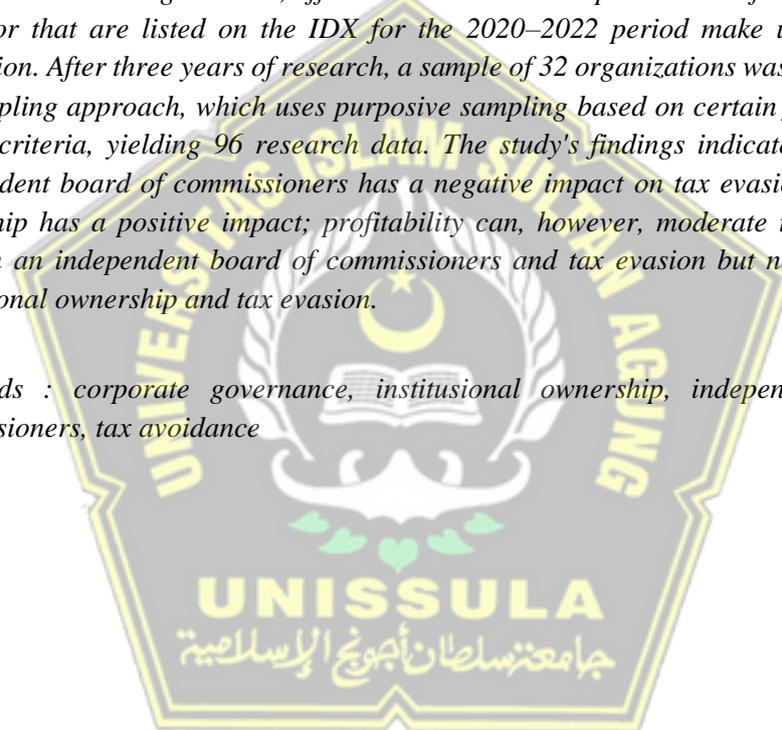
The Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance with Profitability as a Moderating Variable

(Study on Food and Beverage Sub Sector Manufacturing Companies Listed in Indonesian Stock Exchange Period 2020-2022)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how corporate governance, with profitability acting as a moderating variable, affected tax evasion. Companies in the food and beverage subsector that are listed on the IDX for the 2020–2022 period make up the research population. After three years of research, a sample of 32 organizations was obtained using the sampling approach, which uses purposive sampling based on certain features that fit the set criteria, yielding 96 research data. The study's findings indicate that while an independent board of commissioners has a negative impact on tax evasion, institutional ownership has a positive impact; profitability can, however, moderate the relationship between an independent board of commissioners and tax evasion but not that between institutional ownership and tax evasion.

Keywords : corporate governance, institutional ownership, independent board of commissioners, tax avoidance



INTISARI

Tujuan dilakukan penelitian buat uji pengaruh *corporate governace* pada *tax avoidance* dengan profitabilitas selaku variabel pemoderasi dengan hipotesis awal, yaitu : (1) Kepemilikan institusional berdampak negatif pada *tax avoidance*, (2) Dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*, (3) Profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional pada *tax avoidance*, (4) Profitabilitas bisa memoderasi hubungan antara dewan komisaris independent pada *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman terdaftar di BEI periode 2020-2022. Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif, dimana data diolah memakai bantuan aplikasi Microsoft excel serta SPSS versi 26. Pemilihan sampel memakai metode purposive sampling. Jumlah perusahaan jadi sampel ialah 32 perusahaan selama 3 periode, total data sampel penelitian adalah 96 data. Penelitian ini memakai analisis regresi moderasi ataupun *moderated regression analyze*.

Hasil penelitian memperlihatkan jika kepemilikan institusional berdampak positif pada *tax avoidance*, dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*, profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional pada *tax avoidance*, namun profitabilitas bisa memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji beserta syukur pada Allah SWT telah limpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada semua orang, termasuk pada penulis. Hingga penulis bisa untuk menyelesaikan skripsi berjudul: “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan pra skripsi ini merupakan salah satu syarat meraih gelar sarjana S1 Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sadari jika banyak pihak yang turut membantu. Oleh sebab itu, penulis ingin ucapkan terimakasih atas bantuan doa, beserta semangat atau motivasi yang sudah diberi utamanya pada:

1. Allah SWT. atas rahmat serta karunia-Nya yang selalu tercurahkan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyو, SE., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA sebagai Kaprodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Sutapa, SE., M.Si., Akt sebagai dosen pembimbing yang sudah membimbing beserta memberikan arahan beserta masukan dengan baik.
5. Semua dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberi ilmu yang bermanfaat.

6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Suroto, Ibu Khofifah serta adik Fandi Ahmad serta semua keluarga yang sudah memberi kasih sayang serta support yang sebesar-besarnya kepada penulis.
7. Kepada teman-teman penulis, Erika, Erikur, Eriyani, Tiyas serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Segenap teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
9. Semua pihak yang terlibat serta tidak bisa disebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teoritis	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	13
2.2 Variabel Penelitian	15
2.2.1 Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>).....	15
2.2.2 <i>Corporate Governance</i>	17
2.2.3 Profitabilitas	21
2.3 Penelitian Terdahulu	24
2.4 Pengembangan Hipotesis	27
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax avoidance</i>	27

2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax avoidance</i>	28
2.4.3 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax avoidance</i>	29
2.4.4 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i>	30
2.5 Model Penelitian	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Sumber data	32
3.2 Populasi dan Sampel	32
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel	33
3.3.1 Variabel Dependen	33
3.3.2 Variabel Independen	34
3.3.3 Variabel Moderasi	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data	38
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	38
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	38
3.5.3 Uji Hipotesis	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian	45
4.2 Hasil Uji Analisis Data Penelitian	48
4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	48
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	50
4.2.3 Pengujian Hipotesis	56
4.3 Pembahasan Hasil Pengujian	61
4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	61
4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	63

4.3.3 Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan Antara Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	64
4.3.4 Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	66
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Keterbatasan.....	69
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020	2
Tabel 1.2	Fenomena-Fenomena Tax avoidance di Indonesia	3
Tabel 2.1	Tabel Hasil Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Tabel Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Penilaian Durbin-Watson	41
Tabel 4.1	Kriteria Sampel Penelitian	46
Tabel 4.2	Daftar Sampel Data Perusahaan	47
Tabel 4.3	Uji Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 4.7	Hasil Uji Heterokedastisitas	56
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
Tabel 4.9	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	58
Tabel 4.10	Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji t)	59



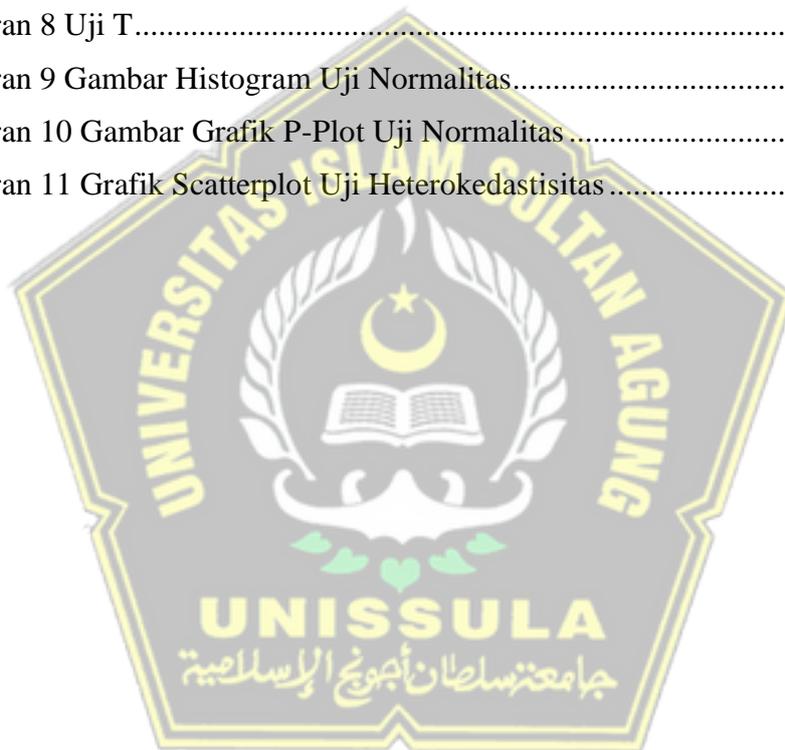
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi.....	31
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan histogram <i>normality</i>	51
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik <i>Normality Probability Plot</i>	51
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data	75
Lampiran 2 Uji Normalitas	77
Lampiran 3 Uji Multikolinearitas	77
Lampiran 4 Uji Autokorelasi	78
Lampiran 5 Uji Glejser (Uji Heterokedastisitas)	78
Lampiran 6 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	78
Lampiran 7 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	79
Lampiran 8 Uji T.....	79
Lampiran 9 Gambar Histogram Uji Normalitas.....	80
Lampiran 10 Gambar Grafik P-Plot Uji Normalitas	80
Lampiran 11 Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah iuran wajib orang pribadi ataupun badan kepada negara diwajibkan berlandas UU, dengan tidak peroleh imbalan secara langsung, beserta dikenakan buat keperluan negara. Kontribusi pajak memberikan peranan penting selaku sumber penghasilan utama bagi negara buat membiayai bermacam program pembangunan ekonomi serta layanan publik, semacam infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta lainnya.

Peran pajak dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai penerimaan terbesar negara yang bertujuan sebagai peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berasal dari penerimaan pajak harus dilakukan secara merata dan menyeluruh. Pemerintah dapat menggunakan penerimaan pajak untuk menginvestasikan dana dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta pendapatan pajak berperan menjaga stabilitas keuangan negara, yang digunakan untuk membantu pemerintah dalam membiayai defisit anggaran atau mengurangi utang publik. Semua peran pajak dalam berbagai sektor tersebut bersatu dalam mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat dalam skala nasional (Oktamawati, 2017).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target pajak	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi pajak	1.105,81	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Presentase penerimaan pajak	81,60%	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016-2020 (*dalam miliar rupiah*)

Bersumber dari tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia alami kemajuan pada setiap tahunnya, tapi penerimaan pajak tersebut belum menggapai target diinginkan oleh pemerintah di Indonesia dan justru pencapaiannya semakin menurun. Khususnya mulai tahun 2016-2020, hal ini dapat dilihat melalui presentase penerimaan pajak masih belum maksimal, terutama pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan presentase penerimaan pajak sebesar 7,79%. Tetapi mengalami peningkatan kembali sebesar 4,81%. Bisa dikatakan jika penerimaan pajak di Indonesia belum optimal.

Realisasi penerimaan pajak yang belum sepenuhnya optimal tersebut pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar pembayaran pajak dapat meningkat. Dikutip dari pernyataan Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah terus mengembangkan strategi yang akan diambil pada tahun 2021 dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum guna untuk meningkatkan pembayaran pajak, serta menerapkan *instrument on tax treaty* (MLI) yang merupakan modifikasi dari pengaturan *tax treaty*. *Tax treaty* sendiri ialah sebuah perjanjian antar 2 negara untuk meminimalisir pemajakan berganda serta Penghindaran pajak. Indonesia sendiri merangkul 68 negara dari 70 negara yang berlaku aktif dalam *tax treaty*. Metode tersebut akan mulai diterapkan guna pemotongan serta pemungutan pajak

pada tahun 2021 serta pembayaran pajak pada tahun 2022. Salah satu faktor belum maksimalnya penerimaan pajak yang ditargetkan pajak oleh pemerintah karena adanya penghindaran pajak. Salah satu jenis penghindaran pajak yaitu *tax avoidance*.

Penghindaran pajak yakni perilaku tidak melanggar peraturan perpajakan sebab memanfaatkan celah hukum perpajakan. *Tax avoidance* ialah suatu usaha menghindari besarnya jumlah pajak, dan dilaksanakan secara aman atau legal bagi perusahaan sebab tidak melanggar dari peraturan perpajakan dengan melalui cara perencanaan pajak (Ayuningtyas & Sujana, 2018).

Bersumber dari laporan *Tax Justice Network* pada Tahun 2020 berjudul *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia diperkirakan alami kerugian sejumlah US\$ 4,78 miliar per tahunnya, jika diperkirakan dalam rupiah yakni sebesar Rp 67,6 triliun. Persoalan tersebut ialah salah satu dampak akibat dari adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilaksanakan wajib pajak. Dalam laporan tersebut dijelaskan jika dalam praktiknya perusahaan multinasional akan alihkan labanya ke negara yang masih rendah dalam mengatur perpajakan. Langkah ini dilakukan guna tidak melaporkan laba yang sebenarnya diperoleh. Dengan demikian, maka perusahaan membayarkan pajak yang lebih sedikit dibandingkan dengan realitanya.

Tabel 1.2
Fenomena-Fenomena Tax avoidance di Indonesia

Nama Perusahaan	Fenomena Tax avoidance
PT RNI (Perusahaan dibidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura)	Pada tahun 2016, PT RNI ditemukan melaksanakan Penghindaran Pajak (P3) dengan sejumlah cara, seperti akui adanya utang afiliasi modal, mengungkapkan kerugian cukup besar, dan menyatakan omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka memanfaatkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak

Nama Perusahaan	Fenomena <i>Tax avoidance</i>
	Penghasilan yang dirancang khusus untuk UMKM agar memperoleh tarif pajak penghasilan final hanya 1%. Modal dimasukkan ke PT RNI sebagai utang yang dapat menurunkan pajak sehingga perusahaan dapat terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan.
PT Coca Cola Indonesia (Perusahaan dibidang minuman)	Ada kemungkinan terjadi penggelapan pajak terhadap PT Coca Cola Company yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak sejumlah Rp 49,24 miliar. Tahun pajak 2002, 2003, 2004, serta 2006 terlibat dalam gugatan PT Coca Cola. Kemenkeu menjumpai adanya pembengkakan biaya cukup besar pada tahun tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penghasilan kena pajak turun akibat beban biaya yang berat, sehingga pembayaran pajak pun menurun. Penghasilan kena pajak pun menurun akibat peristiwa ini.
PT Adaro Energi Tbk (Perusahaan dibidang pertambangan dan perdagangan batu bara)	Melakukan praktik <i>Tax avoidance</i> dengan skema transfer pricing lewat anak perusahaannya <i>Coaltrade Services Internasional</i> yang berada di Singapura. Laporan <i>Global Witness International</i> tanggal 4 Juli 2019 menyatakan bahwa PT Adaro memindahkan semua laba dan pendapatannya ke anak perusahaannya di Singapura sebab tarif pajak Singapura 17% lebih rendah daripada Indonesia. Laporan keuangan perusahaan tersebut mengungkapkan adanya transaksi anomali, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan harga transfer dibandingkan dengan harga batu bara di pasar global.
PT Bentoel Internasional Investama	Pada tahun 2019, perusahaan tembakau milik <i>British American Tobacco</i> (BAT) ditemukan sudah menghindari pembayaran pajak, menurut laporan <i>Tax Justice Network</i> . Menurut penyelidikan, ada dua cara BAT menarik sebagian pendapatannya dari Indonesia. Pertama, dari tahun 2013 hingga 2015, melalui pinjaman yang dilakukan di dalam perusahaan. Kedua, dengan mengembalikan uang ke Inggris dalam bentuk royalti, biaya, dan layanan. Dengan demikian, negara tersebut mungkin kehilangan US\$ 14 juta setiap tahunnya.

Sumber : diolah dari berbagai referensi

Berdasarkan pada fenomena-fenomena praktik *tax avoidance* tersebut bisa dikatakan jika *tax avoidance* ialah suatu hal yang unik, dimana pada dasarnya penghindaran pajak ini ialah perihal yang bersifat sah buat dilaksanakan sebab tidak melanggar dari peraturan pajak. Namun dengan adanya praktik ini akibat nya akan berdampak pada penerimaan negara. Adapun beberapa pendapat dari para ahli tentang pro dan kontra dari *tax avoidance*. *Tax avoidance* tidak dilarang dalam peraturan perpajakan, tetapi dianggap bermaksud negatif karena dianggap bersifat tidak nasionalis (Sunarto et al., 2021). Tetapi berbeda pendapat dengan Maryati & Tarmizi (2015), dimana tindakan *tax avoidance* diduga lebih adil serta bermoral mengenai niat buat hemat beban pajak yang bisa diterapkan perusahaan dalam menghemat beban pajak yang bisa diterapkan wajib pajak seperti perusahaan (Maryati & Tarmizi, 2015).

Adanya pro dan kontra dari pendapat para ahli, peneliti tertarik buat meneliti lebih lanjut terkait *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak dikorporasi dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang jadi penyebab perusahaan melaksanakan aktivitas penghindaran pajak yaitu *corporate governance* (tata kelola) meliputi kepemilikan institusional dan komisaris independen kemudian diperkuat dengan adanya variabel moderasi yakni profitabilitas.

Menurut Chandra (2022), profitabilitas adalah kapasitas suatu bisnis buat hasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, serta modal saham tertentu selama jangka waktu sudah ditetapkan. Terdapat beberapa metode untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, yang semuanya bergantung pada perbandingan laba dan

ekuitas atau aset. Tujuan dari adanya profitabilitas bagi perusahaan, yakni untuk mengukur keefektifan perusahaan dengan mengaitkan laba bersih dengan total aset yang dipakai buat hasilkan laba.

Menurut Ayuningtyas & Sunjana (2018), profitabilitas merupakan representasi keberhasilan finansial bisnis dalam hal menghasilkan uang dari pengelolaan aset, ataupun *Return on asset* (ROA). Hubungan antara ROA dan laba bersih perusahaan serta pajak penghasilan terlihat jelas. (Kurniasih & Sari, 2013). Jumlah laba bersih didapatkan bisnis meningkat seiring dengan profitabilitasnya. Laba perusahaan yang tinggi bakal mendorong perusahaan buat meminimalkan pajak sebab laba yang meningkat akan menghasilkan pajak penghasilan yang lebih tinggi. Bisnis yang berorientasi pada laba akan membujuk bisnis lain untuk melakukan penghindaran pajak.

Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan jika profitabilitas ialah salah satu faktor utama terciptanya upaya untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan yang miliki profit atau keuntungan yang relatif tinggi akan cenderung bakal melakukan upaya tersebut. Sebab dari keuntungan perusahaan sehingga bakal dihitung beban pajak yang mesti dibayarkan perusahaan. Dari hasil penelitian dilaksanakan Jamothon Gultom (2021) memperlihatkan jika profitabilitas miliki dampak negatif pada *tax avoidance* sementara itu dari penelitian dilaksanakan Ni Putu Lissya Suryantari (2022) profitabilitas miliki dampak positif pada *tax avoidance*.

Menurut Purbowati (2021), *corporate governance* sendiri ialah sebuah system pengendalian serta pengaturan yang mengatur hubungan antara beberapa

pihak saling berkepentingan demi untuk tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik bakal tingkatan keunggulan dalam bersaing. *Corporate governance* dikenakan buat awasi manajemen pajak supaya bisa berjalan sesuai dengan kebijakan berlaku. Dengan terapkan prinsip-prinsip *corporate governance* maka, perusahaan bisa membangun struktur tata kelola yang kuat dan dapat memastikan pertanggungjawaban yang baik pada berberapa pihak terlibat. *Corporate governance* dipengaruhi pihak internal ataupun eksternal. Meliputi dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham serta para auditor perusahaan. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* dipakai ialah kepemilikan institusional beserta dewan komisaris independen.

Setiawan & Syarif (2019), mengatakan kepemilikan institusional yakni bagian saham sebuah perusahaan dipunyai investor institusi, termasuk reksa dana, penyedia asuransi, dana pensiun, serta lainnya (Setiawan & Syarif, 2019). Investor institusi akan mengawasi tindak manajemen laba yang dilaksanakan manajer perusahaan. Adanya proses pengawasan tersebut, kepemilikan institusional dapat kendalikan pihak manajemen hingga mengarahkan pada tujuan yang telah ditentukan. Hal ini merupakan sebuah upaya dalam mengurangi *tax avoidance*. Menurut penelitian Dinda Yuliana (2021), kepemilikan institusional berdampak positif pada *tax avoidance* sementara itu menurut penelitian Hikmah & Sulistyowati (2020), kepemilikan institusional berdampak negatif pada *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen adalah salah satu sistem tata kelola perusahaan. Seseorang yang tidak memegang jabatan direktur dalam suatu usaha yang berhubungan dengan pemilik perusahaan serta tidak mempunyai hubungan

dengan pemegang saham pengendali adalah dewan komisaris independen. Dewan direksi yang tidak memihak dalam suatu organisasi dapat memberikan panduan kepada para manajer untuk membantu mereka mengelola bisnis dan mengembangkan strategi perbaikan, seperti menetapkan aturan pembayaran pajak (Ayunintyas & Sunjana, 2018). Dari penelitian yang dilakukan Sunarsih (2019) dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*, sementara itu penelitian dilaksanakan Arry Eksandy (2017) dewan komisaris independen berdampak positif pada *tax avoidance*.

Pajak ialah sumber utama pendapatan negara, penghindaran pajak dapat merugikan negara. Namun, tata kelola perusahaan yang tepat diharap bisa kurangi praktik tersebut. Akuntabilitas amat penting buat *good corporate governance*; organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara adil serta jujur. Transparansi tersebut bisa melalui laporan keuangan perusahaan yang harus secara wajar untuk disajikan bagi para pemakainya dan dalam laporan perusahaan juga harus menyajikan apa adanya sesuai yang terjadi pada perusahaan (Dewi, 2019).

Penelitian ini bermaksud buat dapat melihat apakah hasil penelitian berikutnya yang bakal dilaksanakan miliki hasil penelitian serupa ataupun berbeda. Dalam penelitian ini, miliki tujuan buat menganalisis faktor yang mempengaruhi perusahaan melaksanakan *tax avoidance*. Faktor tersebut yakni *corporate governance* dan profitabilitas sebagai pemoderasi. Refleksi adanya hasil penelitian dari Muhammad Yusuf (2021). Peneliti mengenakan Kepemilikan Institusional serta dewan komisaris independen selaku indikator dari *Corporate Governance* serta mengganti sampel dan populasi dari perusahaan pertambangan ke perusahaan

manufaktur sektor makanan dan minuman. Dari hasil penelitian dilaksanakan Muhammad Yusuf (2021) Temuan penelitian memperlihatkan jika, sementara dewan komisaris independen yang diatur oleh profitabilitas mengurangi hubungan antara komisaris independen serta *tax avoidance*, kepemilikan institusional, jika dimoderasi oleh profitabilitas, dapat memiliki dampak yang lebih kuat pada *tax avoidance*.

Mengenai adanya fenomena gap yang terjadi serta *research gap* yang tidak konsisten dari variabel-variabel penelitian, serta adanya dukungan teori yang menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Penulis tertarik melaksanakan penelitian berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022?
3. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022?

4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022.
3. Untuk menganalisis apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022.
4. Untuk menganalisis apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dijadikan selaku literatur beserta juga selaku referensi buat penelitian selanjutnya dengan topik serupa serta bagi mahasiswa dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai penghindaran pajak, dampak yang terjadi ketika melakukan penghindaran pajak serta terutama yakni faktor yang bisa pengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah, menambah informasi mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- b. Bagi Penulis, selaku sarana untuk memperluas wawasan terkait penghindaran pajak dan mengimplementasikan hal yang telah dipelajari dalam proses perkuliahan.
- c. Bagi perusahaan, bisa tingkatkan kinerja perusahaan serta lebih meningkatkan lagi peraturan dan kebijakan yang sudah ditentukan pemerintah tentang undang-undang perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976, dalam teori keagenan terdapat 2 pelaku ekonomi yakni “prinsipal” merujuk pada pihak yang memiliki aset atau sumber daya yang perlu dikelola oleh pihak lain. Prinsipal menugaskan “agen” untuk bertindak menjalankan tugas atau mengelola aset dan bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh kepada prinsipal. Dalam teori keagenan, ada perbedaan visi dan tujuan antara prinsipal dengan agen yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan. Prinsipal ingin agen bertindak sesuai dengan kepentingannya dan melaporkan sepenuhnya informasi kepada prinsipal. Tetapi agen tidak sepenuhnya memberikan informasi kepada prinsipal, sehingga hal tersebut menimbulkan asimetri informasi. Konflik ini dapat menyebabkan perilaku agen yang tidak optimal, seperti risiko moral dimana agen mengambil risiko lebih besar karena tidak bertanggung jawab atas hasil negatifnya. Agen memilih tindakan yang menguntungkan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan prinsipal. Tindakan tersebut akan mempengaruhi kinerja dari agen dan tidak sesuai yang diharapkan oleh prinsipal.

Tujuan dari teori keagenan adalah mencari cara untuk mengatasi atau mengurangi konflik antara agen dan prinsipal, untuk mengatasi konflik keagenan, akan menimbulkan *agency cost*, yakni biaya yang timbul sebab adanya perbedaan kepentingan antara principal serta agen. *Agency cost* bakal ditanggung baik agen

ataupun prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) memisahkan biaya agen jadi 3 biaya yakni *monitoring cost*, *bonding cost* beserta *residual loss*. *Monitoring cost* ialah harga dibayarkan prinsipal buat awasi dan mengelola tindakan agen. *Bonding cost* ialah biaya ditanggung agen buat menyiapkan serta patuhi prosedur yang jamin agen supaya bertindak demi keperluan terbaik prinsipal. *Residual loss* ialah suatu pengorbanan prinsipal atas perbedaan keputusan antara agen serta prinsipal yang dapat mengurangi kekayaan prinsipal. Apabila konflik keagenan makin besar sehingga biaya keagenan yang dikeluarkan pula makin besar.

Pemerintah adalah prinsipal dalam penelitian ini, sedangkan perusahaan adalah agennya. Apabila pemerintah menunjuk perusahaan sebagai agennya buat membayar pajak sesuai peraturan dan ketentuan perpajakan berlaku. Tapi, perusahaan bakal memprioritaskan kepentingannya dalam memaksimalkan laba sambil mengurangi kewajiban pajak sebagai agennya.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dicetuskan Stanley Milgram (1963), teori ini memaparkan terkait ketaatan terhadap hukum pada suatu negara. Menurut M.D. Tyler, kepatuhan merupakan suatu pendekatan dalam bidang hukum yang membahas mengapa individu ataupun kelompok mesti patuhi hukum berlaku. Teori kepatuhan Tyler mengacu pada dua perspektif utama yakni Kepatuhan instrumental dan perspektif normatif. Pendekatan instrumental membuat asumsi bahwa kepatuhan umum individu dimotivasi oleh minat dan reaksi mereka sendiri terhadap berbagai perubahan perilaku yang relevan. Sedangkan kepatuhan normatif berhubungan dengan kepatuhan yang muncul karena individu merasa memiliki tanggung jawab

moral atau norma sosial untuk mematuhi aturan serta berlawanan dengan kepentingan pribadi. Dalam teori Tyler, penting untuk memahami bagaimana kedua jenis kepatuhan ini dapat mempengaruhi perilaku individu dalam konteks hukum dan peraturan.

Menurut Roth et al (1999), kepatuhan wajib pajak adalah menjalankan hak serta kewajiban perpajakan dengan baik serta sesuai peraturan perpajakan berlaku. Teori kepatuhan terkait erat dengan perspektif perusahaan terhadap negara bagian dan pemerintah federal sebagai pembayar pajak korporat. Bisnis yang berlokasi di wilayah tertentu diharuskan patuhi seluruh undang-undang yang berlaku beserta membayar pajak secara penuh serta tepat waktu.

Namun, Peraturan OJK RI No. 14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten ataupun Perusahaan Publik mengatur persyaratan kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan serta laporan tahunan. Sesuai UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Peraturan Pasar Modal yang mengamanatkan agar seluruh perusahaan tercatat di pasar modal sampaikan laporan keuangan berkala pada Bapepam, terdapat pula batas waktu terkait penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Peraturan-peraturan memberikan isyarat kepada perusahaan buat sampaikan laporan keuangan secara tepat pada waktunya serta sesuai ketentuan yang sudah ditentukan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Tax avoidance ialah tindakan buat kurangi beban pajak dengan memperhitungkan potensi akibat pajak. Tindakan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran pajak sebab usaha wajib pajak buat kurangi, meminimalkan, ataupun kurangi beban pajak dilaksanakan dengan cara yang diizinkan peraturan perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Sedangkan menurut Rahayu et al., (2020), *tax avoidance* merupakan tindakan yang sah dan sesuai hukum karna tidak melanggar UU saat ini serta tidak melibatkan pelanggaran hukum apa pun terhadap tujuan perusahaan untuk membayar pajak sesedikit mungkin kepada negara.

Penghindaran pajak ialah praktik yang digunakan beberapa perusahaan buat kurangi kewajiban pajak mereka tetapi dengan cara yang legal. Dalam praktik ini melibatkan penggunaan perencanaan pajak yang cermat, struktur perusahaan yang kompleks, atau pemanfaatan celah-celah hukum yang ada. Banyak negara dan otoritas perpajakan telah memperketat peraturan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dianggap tidak sesuai etika atau merugikan penerimaan pajak negara. Meski strategi penghindaran pajak ini dapat menurunkan pendapatan negara, pemerintah tidak diperbolehkan menempuh jalur hukum (Dewi, 2019). Oleh sebab itu, perusahaan harus memastikan bahwa praktik penghindaran pajak sesuai hukum yang berlaku serta nilai-nilai etika bisnis yang baik.

Menurut Pohan (2018), *tax avoidance* adalah suatu usaha aktif buat hindari pajak, yang aman serta sah buat wajib pajak buat lakukannya selama tidak melanggar undang-undang perpajakan. Strategi digunakan cenderung

memanfaatkan celah hukum (area ketidakpastian yang diakui secara hukum) dalam UU perpajakan buat menurunkan jumlah pajak terutang, sehingga tindakan ini sah dan sah menurut hukum. Pohan (2018) mengatakan ada 4 perihal yang memotivasi wajib pajak dalam mengimplikasikan *tax avoidance*, yakni,

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan, perusahaan akan kurang tertarik menggunakan strategi penghindaran pajak ketika undang-undang pajak lebih kompleks karena hal itu akan mengakibatkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi.
2. Besarnya pajak yang terutang, Indonesia menilai pajak penghasilan menggunakan tarif pajak progresif. Persentase pengukuran pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan wajib pajak. Akibatnya, semakin tinggi jumlah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.
3. Biaya untuk negosiasi, biaya yang dikeluarkan wajib pajak selama negosiasi pelaksanaan hak dan kewajibannya berkenaan dengan pajak, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kepentingan wajib pajak dalam melaksanakan penghindaran pajak ditentukan oleh tinggi ataupun rendahnya biaya terkait dengan melakukan diskusi pajak.
4. Risiko deteksi, Kepentingan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya risiko deteksi karena wajib pajak akan merasa lebih aman melakukan penggelapan pajak ketika risiko deteksi lebih rendah.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut bisa dikatakan jika penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah strategi hukum yang digunakan bisnis buat kurangi jumlah

pajak yang mesti dibayar dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan buat hindari pelanggaran peraturan yang berlaku.

2.2.2 Corporate Governance

Tata kelola perusahaan berkaitan dengan kerangka kerja, peraturan, kebiasaan, dan prosedur yang ditetapkan yang memandu dan mengawasi suatu organisasi. Tata kelola perusahaan mencakup upaya mencapai keseimbangan dengan memperhatikan semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat, pemegang saham, manajemen, pemasok, pelanggan, dan investor (Dwiridotjahjono, 2009)

Corporate governance adalah sistem pengawasan dan pengendalian yang terlihat jelas dalam cara berbagai pemangku kepentingan dalam bisnis berinteraksi satu sama lain serta dalam cita-cita manajemen (Purbowati, 2021). Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan nilainya dapat dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Hal ini karena perusahaan dengan *good corporate governance* bakal beroperasi lebih efisien, yang akan meningkatkan valuasi dan laba (Putra et al., 2022).

Di Indonesia, GCG diperkenalkan sejak adanya krisis ekonomi tahun 1997. Ketika krisis berkepanjangan, pemerintah mulai menerapkan konsep GCG di lingkungan BUMN. Pemerintah terus memberikan dukungan yang kuat terhadap implementasi GCG di Indonesia, yakni dengan cara membentuk Komite Nasional Kebijakan GCG dan membuat pedoman GCG dan diterapkan pada tahun 2000 melalui surat keputusan direksi (Lumbanraja, 2023) . Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

mengatakan jika prinsip *good corporate governance* yang tertuang dalam Pedoman tersebut sejalan dengan standar global dan harus dicontoh. Pedoman Tata Kelola tersebut memuat pedoman penerapan ciri dan konsep *good corporate governance* yang bisa digunakan perusahaan terbuka buat menerapkan prinsip tata kelola.

Menurut Dwiridotjahjono (2009) praktik tata kelola perusahaan yang konsisten harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG. Terdapat 5 prinsip dasar GCG ialah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, beserta kewajaran beserta kesetaraan.

1. Transparansi (*Transparency*), kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni pemegang saham, karyawan, serta masyarakat luas, perusahaan mesti memberi informasi yang akurat serta transparan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), para pemimpin Perusahaan mesti bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan perusahaan, serta mengelola sumber daya perusahaan dengan bijak.
3. Independensi (*Independency*), perusahaan harus dikelola secara independen agar dapat menjalankan prinsip-prinsip GCG, mencegah campur tangan pihak luar, dan mencegah dominasi satu organ perusahaan terhadap organ perusahaan lainnya.
4. Responsibilitas (*Responsibility*), supaya perusahaan bisa terus beroperasi dalam jangka panjang serta dipandang selaku warga perusahaan yang baik, perusahaan mesti menaati hukum serta penuhi kewajibannya terhadap masyarakat serta lingkungan.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan mesti perhatikan kepentingan para pemangku kepentingan serta pemegang saham sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Dari pernyataan diatas bisa dikatakan jika, praktik tata kelola perusahaan yang baik ialah kunci buat mencapai tujuan perusahaan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan *corporate governance* yang baik, perusahaan bisa meningkatkan kinerja, meminimalkan risiko, dan menjaga kepercayaan pemegang saham beserta pemangku kepentingan lainnya. *Good corporate governance* bisa menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan yang etis dan profesional buat ciptakan nilai jangka panjang buat seluruh pihak yang terlibat.

2.2.2.1 Kepemilikan Institusional

Menurut James P.Martin (1987), kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham oleh bank, asuransi, dana pensiun, serta dana investasi besar, di antara organisasi keuangan lainnya. Memiliki saham di perusahaan mendorong pemantauan ketat terhadap kinerja tim manajemen. Kepemilikan institusional yakni sebuah kondisi dimana investor institusi miliki kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dan memiliki fungsi buat melaksanakan pemantauan pada manajer perusahaan (Ratnasari & Nuswantara, 2020).

Kepemilikan institusional yakni kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga memegang peran penting dalam memantau, mengoreksi, serta memengaruhi manajer bisnis untuk menekan mereka agar tidak bertindak egois. Pengawasan maksimum pada kinerja manajemen akan meningkat dengan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan. Ketika entitas institusional

memiliki sebagian besar saham perusahaan, maka entitas tersebut akan melakukan pengawasan lebih besar terhadap bisnis tersebut untuk menghentikan manajer bertindak oportunistik (Hikmah & Sulistyowati, 2020). Khan (2017) berpendapat jika kepemilikan institusional dimiliki oleh organisasi, lembaga keuangan, penyedia asuransi, dan perusahaan investasi lainnya. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam meningkatkan pengawasan kinerja manajer (Khan et al., 2017).

Institusi dianggap lebih berpengalaman dan lebih mampu mengenali kesalahan daripada investor individu karena mereka memiliki saham di perusahaan. Jumlah saham yang dimiliki menentukan tingkat pengawasan investor institusional. Pihak institusional dengan kepemilikan saham lebih besar daripada pemegang saham biasa berhak untuk mengawasi kebijakan dan prosedur perusahaan, memastikan bahwa manajemen menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan kepentingan pemegang saham (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018).

2.2.2.2 Dewan Komisaris Independen

Menurut Putra et al., (2022), dewan komisaris independen ialah komisi yang beranggotakan komisaris dari luar perusahaan yang mengawasi pelaksanaan kinerja perusahaan terkait. Anggota dewan komisaris diangkat berlandaskan RUPS serta tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham utama, anggota dewan direksi, ataupun dewan komisaris lainnya disebut dewan komisaris independen.

Dewan komisaris independent yakni komisaris yang bekerja buat perusahaan lain serta tidak berafiliasi langsung atau tidak langsung dengannya (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018). Sedangkan menurut Chandra (2022),

dewan komisaris independen yakni seorang dewan yang dipilih buat wakikan pemegang saham independen serta dipilih berdasar latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta keahlian professional yang digunakan buat melaksanakan tugasnya sebagai dewan komisaris independen (Chandra, 2022).

Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan siapa pun, serta tidak mempunyai jabatan direktur dalam bisnis terkait. Keadilan dan kesetaraan antara pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya diutamakan, serta pembentukan dewan komisaris independen dimaksudkan untuk mendukung tujuan ini (Saputri & Husen, 2020).

Dewan komisaris independen dalam menjalankan tugasnya harus memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat beserta bisa bertindak secara independen. Komisaris independen berperan penting dalam mekanisme *corporate governance* yang bertindak selaku pihak bertanggung jawab buat mengawasi kinerja dari perusahaan, sehingga dewan komisaris independen bisa pastikan jika pengelolaan perusahaan bisa berjalan dengan baik serta sesuai kebijakan dalam perusahaan (Rahayu et al., 2020).

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kapasitas perusahaan buat hasilkan uang pada tingkat pendapatan, aset, serta modal saham tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Dengan bandingkan keseluruhan laba bersih dihasilkan oleh bisnis dengan total aset dipunyai selama periode waktu tertentu, profitabilitas merupakan ukuran kapasitas perusahaan untuk menciptakan laba (Chandra, 2022).

Profitabilitas ialah rasio yang dipakai buat mengevaluasi kapasitas bisnis dalam hasilkan laba dalam jangka waktu tertentu dan untuk mengukur seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya sebagaimana dibuktikan oleh jumlah laba yang diperoleh dari investasi dan penjualan. Dengan memeriksa laba yang diperoleh, rasio profitabilitas bisa dipakai buat mengevaluasi berapa baik manajemen perusahaan mengelola aset atau kekayaannya (Putri & Putra, 2017). Penilaian terhadap kinerja manajemen tersebut penting untuk dilakukan karena menjadi informasi bagi pemegang saham dan calon investor dari perusahaan. Bila kinerja manajemen dievaluasi semakin membaik dalam mengelola aset perusahaan, akan sangat membantu bila menarik investor agar bisnis dapat menggunakan uang tersebut untuk memperluas kegiatannya.

Rasio profitabilitas adalah salah satu indikator kunci bagi para kreditor karena dapat memberi gambaran mengenai kemampuan sebuah bisnis buat hasilkan keuntungan dan membayar kembali utang. Kreditor ingin memastikan bahwa bisnis yang mereka beri pinjaman memiliki profitabilitas yang cukup untuk menghasilkan arus kas yang memadai untuk melunasi utang. Dengan memantau rasio profitabilitas, kreditor dapat menilai risiko kredit, menetapkan suku bunga, dan mengambil keputusan terkait pemberian atau perpanjangan pinjaman. Sehingga, rasio profitabilitas menjadi penting dalam membantu kreditor membuat keputusan finansial yang tepat.

Profitabilitas adalah sebuah penentu dalam melaksanakan aktivitas penghindaran pajak. Dengan profitabilitas yang tinggi perusahaan bisa hasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi dengan adanya hal tersebut dapat

menyebabkan beban pajak juga semakin tinggi. Jika perusahaan mempunyai laba yang besar cenderung buat hindari pajak, sementara perusahaan yang miliki laba lebih rendah bakal cenderung untuk melakukan pembayaran pajak.



2.3 Penelitian Terdahulu

Adapula hasil penelitian sebelumnya terkait topik berkaitan dengan penelitian bisa diamati tabel:

Tabel 2.1
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Yusuf, Hery Herawati, dan Hsri Yulianti (2021)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: -Komisaris Independen -Kepemilikan Institusional -Komite Audit Variabel Moderating: Profitabilitas	-Kehadiran komisaris independen tidak berdampak pada penggelapan pajak. -Tindakan penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan institusional. -Penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh komite audit. -Kehadiran komisaris independen yang menguntungkan tidak berdampak pada penggelapan pajak. -Dampak penggelapan pajak dapat diperkuat oleh kepemilikan institusional yang dibatasi oleh profitabilitas. -Komite audit yang didorong oleh keuntungan finansial mengurangi dampak penggelapan pajak.
2	Dinda Yuliana, Santi Susanti, dan Sri Zulaihati (2021)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Financial Distress</i> -Kepemilikan Institusional	-Financial distress berdampak positif serta signifikan pada <i>tax avoidance</i> -Kepemilikan institusional berdampak positif serta signifikan pada <i>tax avoidance</i>
3	Jihan Kasrina (2022)	Pengaruh Profitabilitas,	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	-Profitabilitas berdampak pada <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen: -Profitabilitas -Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> -Likuiditas	-Ukuran perusahaan berdampak pada <i>tax avoidance</i> -Ukuran perusahaan berdampak pada <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berdampak pada <i>tax avoidance</i> -Likuiditas berdampak pada <i>tax avoidance</i>
4	Ni Putu Lissya Suryantari & Ni Putu Sri Harta Mimba (2022)	Pengaruh <i>Sales Growth</i> memoderasi <i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Depeden: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Transfer Pricing</i> - <i>Thin Capitalization</i> -Profitabilitas - <i>Bonus Plan</i> Variabel Pemoderasi: - <i>Sales Growth</i>	- <i>Thin capitalization</i> serta profitabilitas berdampak positif pada <i>tax avoidance</i> - <i>Transfer Pricing</i> serta bonus plan tidak berdampak pada <i>tax avoidance</i> - <i>Sales growth</i> dapat memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> , profitabilitas, serta bonus plan pada <i>tax avoidance</i> - <i>Sales growth</i> tidak bisa memoderasi <i>transfer pricing</i> pada <i>tax avoidance</i>
5	Sunarsih, Fahmi Yahya, dan Slamet Haryono (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> Yang Tercatat di Jakarta Islamic Index	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: -Profitabilitas - <i>Leverage</i> - <i>Corporate Governance</i> -Ukuran Perusahaan	-Profitabilitas berdampak negatif pada <i>tax avoidance</i> -Ukuran Perusahaan berdampak negatif pada <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berdampak positif pada <i>tax avoidance</i> - <i>Corporate governance</i> tidak berdampak pada <i>tax avoidance</i>
6	Jamothon Gulton (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: -Profitabilitas - <i>Leverage</i> -Likuiditas	-Profitabilitas berdampak negatif pada <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berdampak pada <i>tax avoidance</i> -Likuiditas tidak berdampak pada <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	I Gede Cahyadi Putra, Ida Ayu Ratih Manuari, dan Ni Kadek Dewi Puspayanti (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Variabel Dependen: -Profitabilitas -Nilai Perusahaan Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i>	- <i>Corporate governance</i> serta Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan - <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan pada profitabilitas - <i>Corporate governance</i> berdampak tidak langsung dengan mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada nilai perusahaan lewat profitabilitas
8	Dewi Kusuma Wardani dan Juliani (2018)	Pengaruh <i>Tax avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Independen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Moderasi: <i>Corporate Governance</i>	-Tata kelola perusahaan, yang diukur berdasarkan kualitas audit, memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak negatif penghindaran pajak pada nilai perusahaan. -Penghindaran pajak tidak berdampak signifikan pada nilai perusahaan.
9	Anggi Syuhada, Yusnaini, Yusnaini, dan Eka Meirawati	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Good Corporate Governance</i> -Profitabilitas	-Kehadiran dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai proksi <i>Good Corporate Governance</i> tampaknya tidak memiliki pengaruh besar terhadap <i>Tax avoidance</i> . -Pengaruh profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i> sebagian besar negatif.
10	Nurul Hikmah & Sulistyowati (2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: -Profitabilitas - <i>Leverage</i> -Ukuran Perusahaan	-Profitabilitas berdampak positif pada penghindaran pajak - <i>Leverage</i> berdampak positif pada penghindaran pajak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	-Kepemilikan Institusional	-Ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak -Kepemilikan institusional berdampak negatif pada penghindaran pajak
11	Arry Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: -Komisaris Independen -Komite Audit -Kualitas Audit	-Komisaris independen berdampak positif signifikan pada <i>tax avoidance</i>

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Jensen dan Mekling (1976) berpendapat jika kepemilikan institusional ialah mekanisme *corporate governance* bisa menyelesaikan permasalahan dalam teori keagenan. Adanya presentase saham tertentu dimiliki sebuah instuisi bisa pengaruhi proses dalam penyusunan laporan keuangan. Meningkatnya kepemilikan institusional berarti meningkatnya suara dan insentif bagi organisasi untuk mengawasi manajemen, yang pada gilirannya meningkatkan insentif untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan hal seperti itu, bisnis tidak akan melaksanakan *tax avoidance* atau bertindak dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan. Untuk kurangi konflik keagenan antara pemegang saham serta manajer perusahaan, kepemilikan institusional sangat penting (Jensen dan Meckeling, 1976) dalam (Oktaviani & Agus, 2020). Menurut Dewi (2019),

perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang besar mampu mengawasi dan memengaruhi keputusan manajemen.

Dari hasil penelitian dilaksanakan Muhammad Yusuf et al., (2021) menunjukkan jika *corporate governance* diprosikan kepemilikan institusional berdampak negatif pada *tax avoidance*. Hasil ini serupa dilaksanakan (Koming & Praditasari, 2017) membuktikan jika kepemilikan institusional berdampak negatif pada *tax avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka dirumuskan:

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Dalam teori keagenan mengatakan jika makin banyak jumlah komisaris independen, sehingga makin baik pengawasan serta pengontrolan dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 2012). Diharapkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mencegah penipuan dalam pelaporan pajaknya akan ditingkatkan dengan penunjukan komisaris independen. Manajemen pajak secara tidak langsung dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris dalam organisasi. Pengawasan yang lebih besar pada manajer perusahaan dilaksanakan dewan komisaris independen dengan peringkat yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mencegah aktivitas *tax avoidance* yang dilaksanakan perusahaan.

Bersumber dari penelitian dilaksanakan Sri Mulyani et al., (2018) membuktikan jika dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*. Hasil penelitian serupa Sunarsih et al., (2019) mengatakan jika dewan

komisaris independen berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*. Bersumber pada penelitian sehingga dikatakan.

H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Dalam penelitian ini, nantinya profitabilitas akan diproksikan memakai ROA. ROA digunakan buat mengukur besarnya keuntungan bersih diterima oleh perusahaan (Oktamawati, 2017). Perusahaan dengan basis kepemilikan institusional yang besar bisa memperoleh manfaat dari pengawasan kinerja manajemen yang lebih baik dan lebih sedikit konflik manajemen. Tekanan pihak institusional terhadap manajemen untuk menjalankan strategi efisiensi tarif pajak guna memaksimalkan laba ditunjukkan dengan adanya investor dalam kepemilikan institusional. Profitabilitas perusahaan menunjukkan laba yang tinggi yang diperoleh, dan karena investor juga menginginkan profitabilitas yang tinggi, semakin besar kontrol institusional terhadap bisnis, semakin kecil kemungkinan manajemen internal akan terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk penghindaran pajak (Sanchez & Mulyani, 2020)

Makin besar proporsi kepemilikan institusional di dalam perusahaan sehingga makin mempengaruhi manajer buat menghindari aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan. Saat perusahaan mempunyai profitabilitas tinggi memperlihatkan jika perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang baik dan adanya pengawasan dari pihak investor institusi, maka perusahaan cenderung untuk mengelola pajak dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan komponen moderasi,

yaitu profitabilitas, semakin memengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional serta penghindaran pajak.

H3 : Profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

2.4.4 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

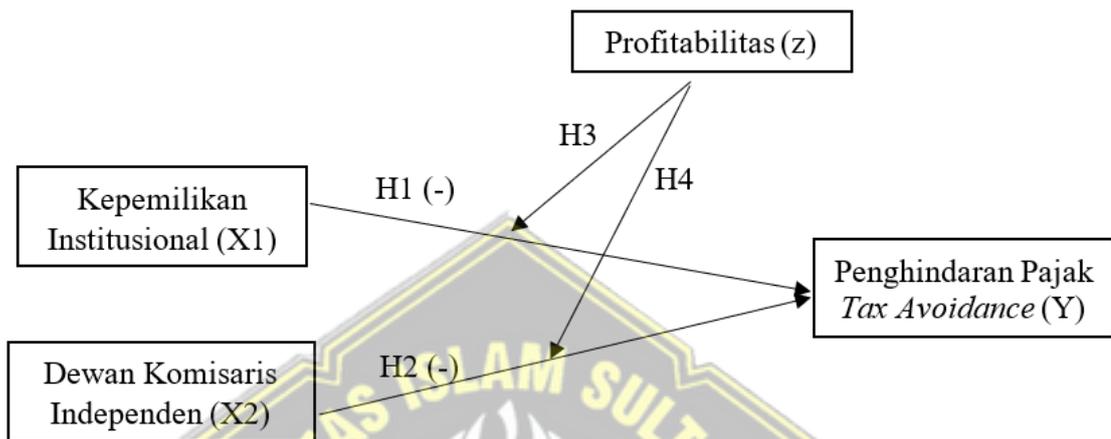
Sama halnya dengan kepemilikan institusional, profitabilitas dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham dalam melaksanakan pengawasan pada tindakan manajer perusahaan dalam ambil suatu keputusan. Sehingga dewan komisaris independen bisa pastikan jika pengelolaan manajemen pada perusahaan bisa berjalan baik serta sesuai kebijakan perusahaan.

Jika profitabilitas tinggi, dewan komisaris independen mungkin memiliki pengaruh lebih signifikan dalam kurangi tingkat *tax avoidance* dalam perusahaan, sebab perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih memperhatikan reputasi dan risiko terkait kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika pada perusahaan dengan profitabilitas rendah, pengaruh dewan komisaris independen pada *tax avoidance* mungkin tidak sekuat pada perusahaan yang lebih menguntungkan. Oleh sebab itu, hubungan antara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak lebih ditetapkan oleh adanya variabel moderasi yakni profitabilitas.

H4 : Profitabilitas memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

2.5 Model Penelitian

Bersumber pada perumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, sehingga secara skematis dibuat kerangka pemikiran:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian deskriptif kausal bermaksud buat ketahui pengaruh antara 2 variabel ataupun lebih. Pada penelitian ini bermaksud buat ketahui pengaruh variabel independen yakni *corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional serta dewan komisaris independen pada variabel dependen yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan profitabilitas selaku variabel moderasi. Sehingga penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Penelitian mengenakan data sekunder. Data didapatkan ialah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan serta minuman yang sudah diaudit yang terdapat di BEI (www.idx.co.id) pada periode 2020-2022 buat mendapatkan data pajak kini, laba sebelum pajak, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan profitabilitas.

3.2 Populasi dan Sampel

Margono (2004), mengatakan populasi ialah jumlah total data yang jadi fokus peneliti selama jangka waktu tertentu. Perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman dan terdaftar di BEI selama periode 3 tahun, tahun 2020 hingga 2022, merupakan populasi penelitian. Sampel ialah bagian populasi yang dianggap mewakili karakteristiknya. Perusahaan manufaktur makanan serta minuman yangenuhi kriteria berikut serta terdaftar di BEI periode 2020–2022 merupakan sampel penelitian. Metode dipakai buat pengambilan sampel ialah

purposive sampling, ataupun pengambilan sampel berlandaskan kriteria ditetapkan sebelumnya. Adapula kriteria sampel yakni:

1. Perusahaan yang telah terdaftar pada BEI termasuk kategori perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman periode 2020-2022.
2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang telah menerbitkan laporan keuangan serta laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 2020-2022.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2020-2022.
4. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang memiliki informasi yang lengkap terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, laba bersih, total aset (aset tetap dan aset lancar), beban pajak perusahaan selama periode 2020-2022.
5. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang memiliki laba positif berturut-turut selama periode 2020-2022

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Dalam bahasa Indonesia, variabel terikat dikatakan selaku variabel dependen. Sugiyono (2019) mendefinisikan variabel dependen sebagai variabel dipengaruhi ataupun hasil dari variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dipakai ialah *tax avoidance* (Y). *Tax avoidance* ialah perencanaan pajak dilaksanakan secara legal masih sesuai ketentuan pajak berlaku buat perkecil jumlah pajak terutang. Kurniasih (2013) *tax avoidance* ialah perjanjian yang dibuat

bertujuan meminimalkan beban pajak dengan mempertimbangkan implikasi pajak di masa mendatang. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran pajak karena wajib pajak menggunakan sarana yang disediakan oleh peraturan pajak untuk melaksanakan tujuan ini.

Indikator dari *tax avoidance* adalah *Effective Tax Rate*. ETR yakni tingkat pajak efektif sebuah perusahaan bisa dihitung dari beban laba penghasilan dibagi laba sebelum pajak (Payanti & Jati, 2020). Pengukuran ETR bisa dijadikan sebagai alat pengukur perencanaan pajak yang efektif. Jika nilai ETR <25% menunjukkan bahwa tingginya penghindaran pajak yang dilakukan atau bahkan sampai melakukan penggelapan pajak, sebaliknya jika nilai ETR >25% menunjukkan bahwa rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan (Kusdiono & Prasasyaningsih, 2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen, dikenal selaku variabel bebas, yakni variabel mempengaruhi, memicu, ataupun mengakibatkan pengembangan variabel dependen. Dalam penelitian, ada 2 variabel independen ialah komponen dari *corporate governance* ialah kepemilikan institusional (X1) beserta dewan komisaris independen (X2)

3.3.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham perusahaan dipunyai perusahaan dapat berperan penting dalam melakukan pengawasan, pendisiplinan

dan berpengaruh terhadap manajer hingga bisa memaksa manajemen buat hindari perilaku yang egois atau mementingkan diri sendiri dalam pengambilan keputusan (Darsani & Sukartha, 2021). Penerapan prinsip akuntansi konservatif oleh manajemen diharapkan akan didorong dan pemantauan kinerja manajemen ditingkatkan dengan tingkat kepemilikan institusional yang signifikan.

Kepemilikan institusional ditentukan dengan melihat indikator yang memperlihatkan proporsi kepemilikan saham lembaga pada jumlah total modal saham yang beredar (Fiandri & Muid, 2017).

$$KI = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

3.3.2.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen yakni anggota eksternal dewan komisaris, bertugas mengevaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan. Menurut Saputri & Husen (2020), dewan komisaris independen ialah anggota dewan komisaris ditunjuk RUPS berlandaskan keputusan dibuat oleh pihak tidak berhubungan dengan pemegang saham utama, dewan direksi, ataupun komisaris lainnya. Menurut teori keagenan, Jensen dan Mekling (1976) menemukan bahwa makin banyak komisaris independen, makin efektif mereka dapat memantau serta mengatur tindakan manajer perusahaan.

Menurut Dewi (2019), dewan komisaris independen ditetapkan dengan bagi jumlah total komisaris dengan rasio atau persentase komisaris independen. Ketika proporsi komisaris independen melebihi tiga puluh persen, perusahaan tersebut

menjalankan tata kelola yang sangat baik. Untuk mencegah perusahaan terpengaruh untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh keinginan manajemen untuk menghemat pajak dan memotong biaya agensi, perusahaan harus mampu mengendalikan dorongan ini.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}}$$

3.3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi yakni nama lain untuk variabel yang memiliki kemampuan pengaruhi, baik dengan memperkuat ataupun melemahkan, hubungan antara variabel bebas serta terikat. Variabel moderasi dipakai ialah profitabilitas (*Z*) yang disangka bisa pengaruhi hubungan antara variabel independen serta dependen.

Profitabilitas ialah sebuah rasio keuangan yang mengukur keterampilan perusahaan dalam menghasilkan laba ataupun profit. Menurut Putri & Putra (2017), profitabilitas ialah rasio buat menilai keterampilan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan profit dalam periode tertentu, beserta memberi ukuran sejauh mana tingkat efektivitas manajemen perusahaan bisa diketahui melalui hasil penjualan serta investasi. Rasio profitabilitas juga dapat digunakan buat menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun kini.

Profitabilitas diduga dalam hipotesis bisa memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional serta proporsi komisaris independen dengan *tax avoidance*. Rasio profitabilitas bisa jadi faktor penting bagi pemegang saham untuk diperhatikan saat manajemen perusahaan membuat keputusan tentang kebijakan perusahaan dan bagaimana mereka bertindak. Makin tinggi profitabilitas

perusahaan sehingga memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan yang baik hingga dapat mengatur pendapatan serta pembayaran beban pajak yang terutang (Indriawati, 2017). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur mengenakan ROA.

$$\text{Return on asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Tabel 3.1
Tabel Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepemilikan institusional (X1)	Kepemilikan institusional adalah sebuah keadaan dimana investor institusi mempunyai kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dan mempunyai fungsi buat melaksanakan pengawasan pada manajer perusahaan (Dhuwik Ratnasari, 2020)	$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$	Rasio
2	Dewan komisaris independen (X2)	Dewan komisaris independen ialah komisaris yang bekerja pada perusahaan secara independen dan tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan asosiasi (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018)	$DKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$	Rasio
3	Tax avoidance (Y)	Tax avoidance yakni tindakan legal yang dilaksanakan perusahaan dan tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang berlaku (Yusuf et al., 2021)	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
4	Profitabilitas (Z)	Profitabilitas ialah kapasitas bisnis buat hasilkan laba dalam jangka waktu tertentu (Irton et al., 2022)	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$	Rasio

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dikenakan ialah studi pustaka serta dokumentasi. Studi pustaka dilaksanakan dengan kelolah data, artikel, jurnal berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Kegunaan dari studi pustaka ini ialah untuk menggali teori-teori dasar serta konsep yang sudah ditemukan para peneliti terdahulu dan mendapatkan orientasi yang lebih luas terkait topik yang dipilih.

Sedangkan studi dokumentasi dilaksanakan dengan cara kumpulkan data sekunder dipakai buat selesaikan masalah penelitian ini semacam laporan keuangan tahunan perusahaan jadi sampel pada penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19), statistik deskriptif dipakai buat memberi ringkasan ataupun penjelasan data berdasarkan nilai rata-rata, simpangan baku, rentang, kurtosis, maksimum, minimum, total, dan kemiringan (kemiringan distribusi). Dengan menggunakan data sampel dan populasi dari penelitian ini, statistik deskriptif merupakan cara buat mengumpulkan dan menyajikan data yang dapat memberikan informasi relevan untuk tinjauan umum subjek yang sedang diteliti.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dipakai buat uji kelayakan dari pemakaian variabel-variabel penelitian. Uji ini dilakukan sebelum melaksanakan analisis lebih lanjut pada data yang sudah terkumpul. Mengingat data dipakai penelitian ini bersifat sekunder, pengujian asumsi klasik meliputi pengujian heteroskedastisitas,

autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas harus dilakukan untuk menghasilkan model.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan buat menentukan apakah variabel dependen, independen, maupun keduanya memiliki distribusi normal ataupun tidak. Distribusi normal ataupun hampir normal adalah modalitas regresi yang baik dalam uji normalitas. Diasumsikan bahwa nilai residual memiliki distribusi normal untuk tujuan uji-t serta uji-f yang mengikutinya. Terdapat 2 teknik yang bisa dipakai buat tentukan apakah residual memiliki distribusi normal ataupun tidak: analisis statistik serta analisis grafis.

Uji statistik dipakai buat menguji normalitas residual ialah uji statistik nonparametrik Kolomogrov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilaksanakan dengan langkah:

1. Dilakukan dengan membuat hipotesis

H₀: Data residual berdistribusi normal

H_a: Data residual tidak berdistribusi normal

2. Menentukan tingkat distribusi normal $\alpha = 0,05$

Ketentuan yang harus dipenuhi jika melalukan uji K-S yaitu, jikalau nilai sig > 0,05 hingga data dipakai penelitian memiliki distribusi normal. Sementara itu jikalau nilai sig > 0,05 sehingga data yang dipakai tidak memiliki distribusi normal.

3. Kriteria pengambilan keputusan

H₀ diterima jikalau P-Value dari uji Kolomogrov-Smirnov (K-S) 0,05 ataupun > 0,05.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai buat menentukan apakah variabel independen model regresi memiliki korelasi tinggi satu sama lain. Dalam model regresi yang ideal, semestinya tidak ada korelasi antara variabel independen; jikalau adanya korelasi, variabel tidak ortogonal. Saat koefisien korelasi antara variabel independen ialah 0, variabel dikatakan ortogonal. VIF serta batas Toleransi dapat digunakan buat tentukan apakah adanya korelasi antara variabel independen dalam model regresi atau tidak. Ketika variabel independen tertentu dipilih serta variabilitasnya tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen lainnya, toleransi diukur.

1. Jikalau tolerance $> 0,10$ beserta VIF < 10 , hingga dinyatakan jika tidak adanya multikolinearitas dalam penelitian
2. Jikalau tolerance $< 0,10$ beserta VIF > 10 , hingga dikatakan adanya multikolinearitas terjadi dalam penelitian

Terdapat alternatif cara untuk mengatasi adanya multikolinearitas dalam penelitian, seperti mengganti ataupun mengeluarkan variabel yang memiliki korelasi yang tinggi atau mentranformasikan data kedalam bentuk lain (logaritma, akar kuadrat ataupun *first difference delta*).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipakai buat menentukan apakah residual pada periode t dan residual pada periode $t-1$ model regresi linier menunjukkan korelasi. Model regresi tanpa autokorelasi diduga berkualitas tinggi. Masalah korelasi muncul jika ada korelasi. Hubungan antara pengamatan berturut-turut yang dilaksanakan

sepanjang waktu menimbulkan masalah ini. Data *time series* sering kali mengandung hal ini.

Salah satu cara buat uji autokorelasi ialah dengan uji D-W. Uji D-W ialah suatu uji dipakai buat deteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual dari suatu analisis regresi. Hipotesis untuk pengujian Durbin-Watson ialah:

H_0 : tidak adanya autokorelasi dalam penelitian ($r = 0$)

H_a : terdapat adanya korelasi dalam penelitian ($r \neq 0$)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson bisa diketahui dari tabel model summary pada penilaian Durbin-Watson, selanjutnya dibandingkan:

Tabel 3.2
Penilaian Durbin-Watson

Kriteria	Keterangan
$0 < d < dl$	Terdapat autokorelasi
$dl \leq d \leq du$	Tidak terdapat Kesimpulan
$4 - dl < d < 4$	Terdapat autokorelasi
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Tidak terdapat Kesimpulan
$du < d < 4 - du$	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Imam Ghozali (2016)

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dipakai buat uji keberadaan ketidaksetaraan varians antara observasi dalam residual model regresi. Istilah "homoskedastisitas" merujuk pada situasi di mana varians dalam residual antara observasi ialah sama; heteroskedastisitas muncul ketika varians berbeda. Varians variabel harus konstan (homokedastisitas) agar model regresi dianggap sangat baik. Dengan scatterplot, seseorang dapat menguji hubungan antara residual (SRESID) dan nilai proyeksi variabel dependen (ZPRED) buat uji heteroskedastisitas model regresi linier berganda. Tidak adanya heteroskedastisitas jika, menurut analisis pengambilan

keputusan, tidak adanya pola yang terlihat beserta data tidak tersebar di atas ataupun di bawah 0 sumbu y. Hasil dari grafik scatterplot tersebut akan ditunjang dengan uji glejser dengan melihat signifikansinya yang didasarkan pada pengambilan keputusan:

1. Jikalau nilai signifikan nya $> 0,05$ sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas
2. Jikalau nilai signifikan nya $< 0,05$ sehingga ada gejala heterokedastisitas

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Moderate (MRA)

Analisis regresi moderasi berperan sebagai faktor yang memengaruhi seberapa baik atau buruknya korelasi variabel independen dan dependen. Uji interaksi adalah salah satu alat yang dipakai buat evaluasi regresi yang dimoderasi. Ketika 2 ataupun lebih variabel independen dikalikan, komponen interaksi disertakan dalam persamaan. Ini dikenal sebagai analisis regresi moderate (MRA) dari regresi linier berganda.

Pada penelitian ini, interaksi yang terjalin ialah perkalian antara kepemilikan institusional (KI) serta dewan komisaris independen (DKI) pada profitabilitas (ROA) beserta *tax avoidance* (ETR). Uji MRA bisa dihitung dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 DKI + \beta_3 ROA + \beta_4 KI.ROA + \beta_5 DKI.ROA + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Tax avoidance*

- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- KI = Kepemilikan Institusional
- DKI = Dewan Komisaris Independen
- ROA = Profitabilitas
- ε = Error

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (Adj.R²)

Koefisien determinasi adalah metrik yang dipakai buat menyatakan berapa jauh model bisa memperhitungkan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 serta 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Makin dekat nilai koefisien determinasi dengan angka 1, makin akurat model regresi dan makin banyak informasi yang ditawarkannya untuk memperkirakan perubahan variabel dependen. Sebaliknya, model regresi kurang efektif serta jelaskan fluktuasi variabel dependen yang terbatas jikalau nilai koefisien determinasi mendekati nol.

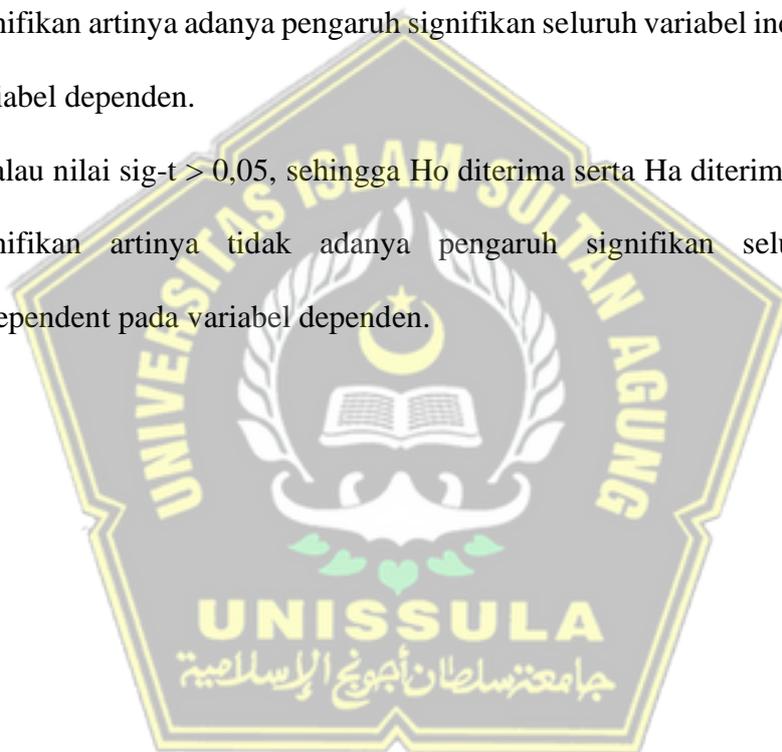
3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dipakai buat menentukan apakah variabel dependen dipengaruhi variabel independen secara bersamaan. Lebih jauh, apakah model regresi signifikan ataupun tidak, bisa dipastikan menggunakan uji F. Model regresi bisa dipakai guna membuat prediksi jika menunjukkan signifikansi statistik. Sebaliknya, suatu model tidak dapat digunakan untuk membuat prediksi jika tidak signifikan. Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari uji F (F-test) dengan ketentuan, jikalau $F_{hitung} > F_{tabel}$ hingga H_0 ditolak serta H_a diterima, dengan tingkat signifikannya jikalau nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$.

3.5.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dipakai buat uji signifikansi serta relevansi dalam satu ataupun 2 kelompok sampel. Uji t bertujuan guna buktikan signifikansi pada pengaruh variabel independen secara individu dalam jelaskan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansinya 0,05 ataupun 5%, dengan kriteria pengujian:

1. Jikalau nilai sig-t $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak serta H_a diterima artinya signifikan artinya adanya pengaruh signifikan seluruh variabel independen pada variabel dependen.
2. Jikalau nilai sig-t $> 0,05$, sehingga H_0 diterima serta H_a diterima artinya tidak signifikan artinya tidak adanya pengaruh signifikan seluruh variabel independent pada variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

Gambaran umum mengenai objek penelitian menyajikan metode pemilihan populasi beserta sampel penelitian. Populasi penelitian yakni perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman terdaftar di BEI pada periode 2020-2022. Serta sampel mencakup populasi tetapi dengan kriteria yang sudah ditetapkan peneliti. Data dikenakan data sekunder bersumber pada laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan yang listing di BEI periode 2020-2022 didapat dari situs resmi BEI www.idx.co.id. Penelitian memakai metode *purposive sampling* pada pengambilan sampel. Metode analisis dipakai ialah metode analisis kuantitatif mengenakan bantuan perangkat lunak Microsoft excel serta SPSS versi 26 selaku alat buat menguji data.

Tujuan adanya prosedur ini ialah buat memperoleh informasi relevan yang ada dalam data, beserta memakai hasilnya buat memecahkan permasalahan penelitian ini. Tabel 4.1 menyajikan perolehan sampel berlandaskan kriteria ditetapkan sesuai keperluan peneliti.

Tabel 4.1
Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022	84
1.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak <i>listing</i> secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022	(22)
2.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022	(4)
3.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak menggunakan mata uang rupiah (Rp) secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022	(3)
4.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian secara berturut-turut pada periode 2020-2022	(20)
5.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki kelengkapan data pada periode 2020-2022	(3)
	Jumlah sampel data penelitian	32
	Jumlah data penelitian (32x3 tahun)	96

Bersumber dari tabel 4.1 bisa diketahui jika perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman pada periode 2020-2022 sejumlah 84 perusahaan. Terdapat 62 perusahaan terdaftar secara berturut-turut periode 2020-2022. Selama periode 2020-2022 terdapat 4 perusahaan yang tidak terbitkan laporan tahunan secara 3 periode berturut yaitu : CPRO, DPUM, GOLL, dan MAGP, serta terdapat 3 perusahaan yang menggunakan mata uang asing yaitu : ANJT, FISH, dan PMMP.

Selama periode 2020-2022 terdapat 20 perusahaan yang memiliki laba negatif atau mengalami kerugian yakni : AGAR, AISA, ALTO, ANDI, BEEF, BTEK, BWPT, DSFI, FOOD, GZCO, IKAN, JAWA, MAIN, MGRO, PGUN,

PSDN, SGRO, SIPD, UNSP, serta WAPO. Dilansir dari www.kemnaker.go.id, Menurut penilaian Kementerian Tenaga Kerja, 88% bisnis yang terkena dampak pandemi selama enam bulan pada tahun 2020 biasanya mengalami kerugian. Dalam penelitian ini terdapat 3 perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sesuai variabel peneliti yakni: CAMP, PALM, ROTI (tidak memiliki kepemilikan institusional dalam perusahaan).

Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, jumlah data perusahaan yang memiliki kriteria penelitian sejumlah 32 perusahaan serta periode pada penelitian yaitu 3 periode yaitu 2020-2022, hingga jumlah sampel dipakai pada penelitian yaitu sejumlah 96 sampel. Berikut ialah nama perusahaan yang jadi sebagai sampel penelitian sesuai kriteria peneliti:

Tabel 4.2
Daftar Sampel Data Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADES	Akasha Wira Internasional Tbk
3	BISI	Bisi International Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
6	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
7	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
8	CPIN	Chaeron Pokphand Indonesia Tbk
9	CSRA	Cisade Sawit Raya Tbk
10	DLTA	Delta Djakarta Tbk
11	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
12	ENZO	Morenzo Abadi Perkasa Tbk
13	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
14	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
18	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
19	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
20	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
21	MYOR	Mayora Indah Tbk
22	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
23	PSGO	Palma Serasih Tbk
24	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk
25	SKBM	Sekar Bumi Tbk
26	SKLT	Sekar Laut Tbk
27	SMAR	SMART Tbk
28	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
29	STTP	Siantar Top Tbk
30	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
31	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
32	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

4.2 Hasil Uji Analisis Data Penelitian

Metode pengujian analisis data yakni analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, serta autokorelasi), uji hipotesis (MRA, koefisien determinasi, uji t, serta uji f). Tujuan adanya penelitian ini ialah buat mendapatkan gambaran pengaruh variabel independen *corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional (X1) serta dewan komisaris independen (X2) pada variabel dependen *tax avoidance* (Y). Beserta apakah variabel moderasi profitabilitas (M) bisa memoderasi hubungan antara variabel independen pada variabel dependen.

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif penelitian ini dipakai buat mendapatkan data ukuran numerik data sampel semacam nilai min, max, *mean*, beserta standar deviasi. Terdapat empat variabel dipakai uji analisis deskriptif ini yakni *tax avoidance* (ETR), kepemilikan institusional (KI), dewan komisaris independen (DKI), beserta profitabilitas (ROA). Hasil analisis deskriptif dilihat tabel 4.3.

Tabel 4.3
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	96	0,217620	0,328952	0,28243798	0,031102150
KI	96	0,465281	0,915239	0,66835743	0,097371859
DKI	96	0,250000	0,571429	0,39123247	0,077316035
ROA	96	0,000112	0,274087	0,07999066	0,058523646
Valid N (listwise)	96				

Sumber : output data sekunder diolah dengan SPSS versi 26

Uji statistik bermaksud buat ketahu karakteristik data. Jika nilai mean > nilai standar deviasi sehingga kualitas dari data baik. Makin rendah standar deviasi dari sampel sehingga akan makin dekat dengan mean, begitupun dengan sebaliknya jikalau makin tinggi standar deviasi sehingga makin rendah keragaman sampel. Diketahui pada tabel 4.3 bahwa nilai mean > nilai standar deviasi artinya jika kualitas data sampel tersebut baik.

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel *Tax Avoidance* (ETR)

Berdasarkan statistik deskriptif, jumlah sampel yang digunakan untuk variabel ETR adalah 96. Nilai minimum ETR ialah 0,217620, sedangkan maksimum mencapai 0,328952. *Mean* ETR adalah 0,28243798 standar deviasi sejumlah 0,031102150.

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepemilikan Institusional (KI)

Berdasarkan statistik deskriptif jumlah sampel yang digunakan untuk variabel KI adalah 96. Nilai minimum KI ialah 0,465281, serta maksimum sejumlah 0,915239. Rata-rata (*mean*) KI berada pada 0,66835743 dengan standar deviasi 0,097371859.

3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jumlah sampel yang digunakan untuk variabel DKI memiliki jumlah sampel 96. Nilai minimum DKI adalah 0,250000, sedangkan nilai maksimum mencapai 0,571429. Mean DKI adalah 0,39123247 standar deviasi sejumlah 0,077316035.

4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Profitabilitas (ROA)

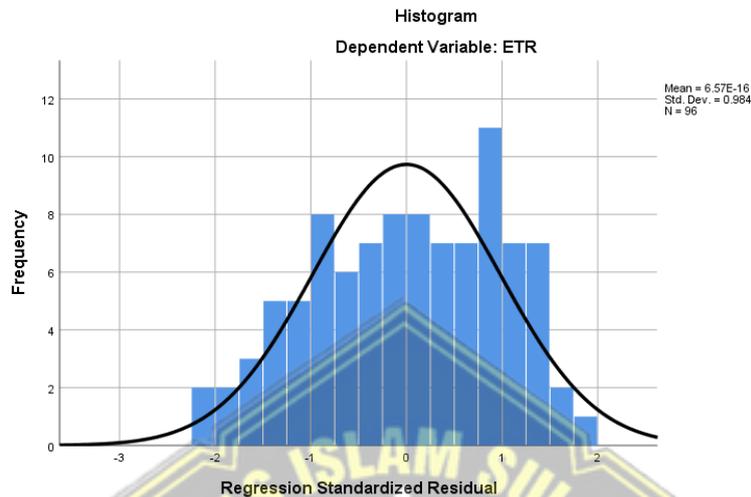
Berdasarkan statistik deskriptif jumlah sampel yang dipakai buat variabel ROA memiliki jumlah sampel 96. Nilai minimum ROA sejumlah 0,000112, beserta maksimum mencapai 0,274087. Rata-rata ROA berada pada 0,07999066 standar deviasi sejumlah 0,058523646.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

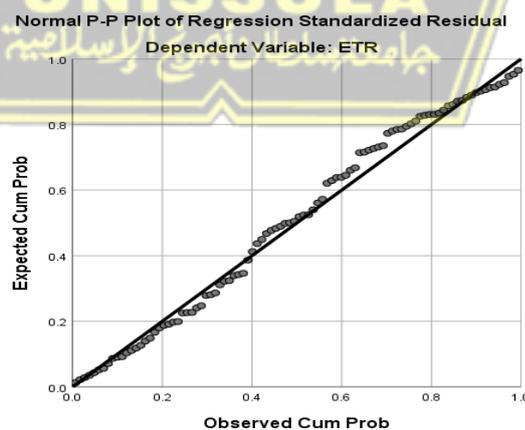
Uji normalitas dilaksanakan buat tentukan apakah variabel dependen, independen, ataupun keduanya dalam regresi miliki distribusi normal. Distribusi normal ataupun dekati normal adalah modalitas regresi yang baik dalam uji normalitas. Analisis statistik dan grafis dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas. Analisis Statistik: Dengan bandingkan data observasi dengan distribusi

menyerupai distribusi normal, grafik histogram menggambarkan temuan uji normalitas. Temuan uji normalitas menggunakan histogram normalitas adalah.



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas dengan histogram *normality*

Berdasarkan gambar 4.1, distribusi data terletak di bawah lekungan serta lekungan berbentuk semacam lonceng. Perihal ini artinya jika distribusi data ialah normal. Perihal ini memperlihatkan jika analisis regresi layak untuk dipakai. Buat menguatkan hasil, dilaksanakan uji lewat grafik P-P Plot.



Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Grafik *Normality Probability Plot*

Grafik plot P-P di atas mengilustrasikan hasil pengujian. Jelas jika titik-titik terdistribusi merata di dekat garis diagonal, yang menunjukkan jika data studi terdistribusi normal. Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dipakai untuk pengujian guna mendukung dua temuan sebelumnya. Nilai residu yang tidak terstandarisasi, atau perbedaan antara nilai yang diharapkan dan nilai aktual dari model regresi, diuji memakai Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* buat melihat apakah hasilnya memenuhi kriteria kenormalan. Nilai sig $>0,05$ digunakan untuk menetapkan data sebagai normal.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,02979591
Most Extreme Differences	Absolute	0,082
	Positive	0,048
	Negative	-0,082
Test Statistic		0,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 ^c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari tabel 4.4 dilihat jika tingkat signifikansi uji normalitas yakni 0,120 artinya $> 0,05$. Perihal ini memperlihatkan jika model regresi tidak memiliki masalah normalitas data ataupun data terdistribusi normal serta layak dipakai.

4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai model regresi buat menentukan apakah variabel independen miliki tingkat korelasi yang tinggi satu sama lain. Untuk melakukan uji multikolinearitas, nilai VIF dan toleransi dibandingkan dengan nilai dibutuhkan. Nilai toleransi $> 0,01$ dan nilai VIF < 10 keduanya harus memiliki nilai yang dibutuhkan. Berikut hasil uji multikolinearitas disajikan tabel 4.5:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KI	0,989	1,011
	DKI	0,990	1,010
	ROA	0,999	1,001
a. Dependent Variable: ETR			

Sumber : Output diolah dengan SPSS versi 26

Bersumber pada hasil pada tabel bisa dilihat jika nilai toleransi adalah $> 0,1$ serta untuk nilai VIF < 10 . Hingga bisa disebut jika tidak ada gejala multikolinearitas pada data penelitian.

4.2.2.3 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipakai buat menentukan apakah residual pada periode t serta residual pada periode $t-1$ (tahun sebelumnya) dalam model regresi linier menunjukkan korelasi. Menggunakan uji Durbin-Watson ialah salah satu pendekatan buat menilai autokorelasi. Uji Durbin-Watson mengidentifikasi apakah ada autokorelasi dalam nilai residual analisis regresi melalui pengujian. Hasil uji Durbin-Watson tabel 4.6:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.287 ^a	0,082	0,052	0,030277816	1,952
a. Predictors: (Constant), ROA, DKI, KI					
b. Dependent Variable: ETR					

Sumber : output diolah dengan SPSS versi 26

Hasil uji autokorelasi memakai *Durbin Watson*, memakai nilai sig 5%, diketahui jumlah sampel 96 (n), serta jumlah variabel independen dan variabel moderasi (sebagai *predictor* atau variabel dalam pengujian) adalah 3 (k=3), nilai *Durbin Watson* (d) pada tabel 1,952. Berdasarkan data tersebut dapat dirumuskan bahwa:

$$dl = 1,603$$

$$du = 1,732$$

$$4-dl = 4-1,603 = 2,397$$

$$4-du = 4-1,732 = 2,268$$

$$du < d < 4-du$$

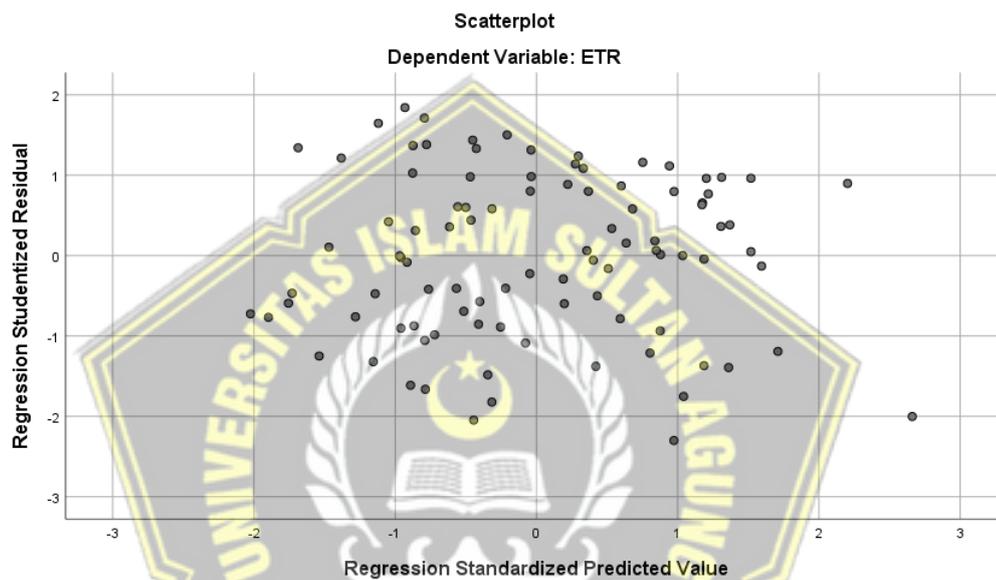
$$1,732 < 1,952 < 2,268$$

Bersumber dari hitungan serta persamaan tersebut, bisa dikatakan jika tidak adanya autokorelasi dalam model regresi linier.

4.2.2.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dipakai buat menentukan apakah residual dari satu observasi tidak diperlakukan secara varians sama dengan residual observasi lain dalam model regresi. Dengan memeriksa grafik scatterplot antara nilai prediksi

variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID), pengujian heteroskedastisitas dalam beberapa model regresi linier bisa dilaksanakan. Hasil dari grafik scatterplot tersebut akan ditunjang dengan uji glejser dengan melihat signifikansinya yang didasarkan pada pengambilan keputusan. Jikalau nilai signifikan nya $> 0,05$ sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas.



Sumber : output diolah dengan SPSS 26

Gambar 4.3
Grafik Scatterplot

Hasil uji heteroskedastisitas memakai grafik scatterplot menunjukkan jika titik tersebar jauh dari sumbu Y serta berada di atas serta di bawah nilai 0. Titik-titik tersebut juga tersebar tanpa membentuk pola apa pun. Oleh karena itu, bisa dikatakan jika data penelitian tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Adapun buat memperkuat hasil, peneliti pula melakukan pengujian lewat uji glejser:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0,023	0,014		1,648	0,103
KI	-0,009	0,017	-0,054	-0,525	0,601
DKI	0,026	0,022	0,124	1,194	0,235
ROA	-0,022	0,028	-0,081	-0,787	0,433
a. Dependent Variable: AbsRes					

Sumber : Output diolah SPSS versi 26

Bersumber tabel 4.7, dihasilkan nilai signifikansi pada kepemilikan institusional (KI) sejumlah 0,601, dewan komisaris independen (DKI) sejumlah 0,235, serta profitabilitas (ROA) sejumlah 0,433. Artinya nilai tersebut > 0,05 untuk setiap variabel. Sehingga bisa dikatakan jika data penelitian telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Pengujian Analisis Regresi Moderasi (Moderate Regression Analysis-MRA)

Analisis regresi moderasi (MRA) ialah jenis regresi linier berganda di mana istilah interaksi (hasil kali 2 ataupun lebih variabel bebas) muncul dalam persamaan. Pada penelitian ini, interaksi terjalin ialah perkalian antara kepemilikan institusional (KI) serta dewan komisaris independen (DKI) pada profitabilitas (ROA) dan *tax avoidance* (ETR) selaku variabel dependen. Variabel moderasi ada variabel bebas menyesuaikan variabel bebas lain dalam hubungannya dengan variabel tersebut, sehingga variabel tersebut menjadi lebih kuat atau lebih lemah.

Pengujian MRA ini meliputi uji koefisien determinasi (R²), uji signifikansi simultan (uji f), uji signifikansi parsial (uji t).

4.2.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dipakai buat ukur berapa baik model jelaskan variasi variabel dependen. Tabel berikut tampilkan hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.394 ^a	0,155	0,108	0,029367323
a. Predictors: (Constant), DKI*ROA, KI, DKI, KI*ROA, ROA				
b. Dependent Variable: ETR				

Sumber : Output diolah SPSS versi 26

Hasil regresi tabel 4.8 mempunyai nilai *Adjusted R Square* sejumlah 0,108 ataupun 10,8%. Sehingga bisa diketahui 10,8% variabel dependen *tax avoidance* bisa dijelaskan oleh variabel independen *corporate governance* yang diprosikan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen serta profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Sementara itu lebihnya 89,2% dijelaskan variabel lain berhubungan dengan *tax avoidance*.

4.2.3.3 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dipakai buat uji apakah variabel independen secara bersamaan pengaruhi variabel dependen. Tidak hanya itu, uji F pula berguna buat ketahui apakah model regresi signifikan ataupun tidak signifikan. Hasil uji statistik F diamati tabel 4.9:

Tabel 4.9
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,014	5	0,003	3,311	.009 ^b
	Residual	0,078	90	0,001		
	Total	0,092	95			

a. Dependent Variable: ETR
b. Predictors: (Constant), DKI*ROA, KI, DKI, KI*ROA, ROA

Sumber : output diolah dengan SPSS versi 26

Pada tabel 4.9 memperlihatkan jika hasil uji signifikansi variabel independen meliputi kepemilikan institusional (KI), dewan komisaris independen (DKI) beserta profitabilitas berdampak secara simultan pada *tax avoidance*. Perihal ini diperlihatkan dengan tingkat sig $0,009 < 0,05$.

4.2.3.4 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dimanfaatkan buat memperlihatkan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan sejauh mana variabel moderasi mempengaruhi satu variabel bebas tunggal guna menjelaskan varians variabel terikat yang dievaluasi pada tingkat sig 0,05. Berikut hasil uji signifikansi parsial (uji t) dalam tabel:

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,263	0,040		6,534	0,000
	KI	0,109	0,049	0,340	2,198	0,031
	DKI	-0,145	0,066	-0,359	-2,184	0,032
	ROA	-0,503	0,364	-0,946	-1,382	0,170
	KI*ROA	-0,307	0,459	-0,413	-0,668	0,506
	DKI*ROA	1,925	0,689	1,485	2,791	0,006

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Output diolah dengan SPSS versi 26

Bersumber pada tabel 4.10 memperlihatkan jika koefisien model regresi mempunyai nilai konstanta sejumlah 0,263, nilai thitung positif sejumlah 6,534 serta tingkat signifikansi 0,000 memperlihatkan jikalau variabel profitabilitas dalam memoderasi variabel independent sehingga rata-rata *tax avoidance* diukur lewat ETR ialah sejumlah 0,263.

Variabel kepemilikan institusional memiliki signifikansi 0,031, menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Variabel dewan komisaris independen memiliki signifikansi 0,032, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Variabel profitabilitas dalam memoderasi kepemilikan institusional memiliki tingkat signifikansi sejumlah 0,506, memperlihatkan jika tingkat signifikannya diatas 0,05. Variabel profitabilitas dalam memoderasi dewan komisaris independen miliki tingkat signifikansi sejumlah 0,006 memperlihatkan jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Dari pengujian ini didapatkan hasil persamaan:

$$Y = 0,263 + 0,109 KI + (-0,145)DKI + (-0,503)ROA + (-0,307)KI*ROA + 1,925DKI*ROA + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = *Tax avoidance*
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 KI = Kepemilikan Institusional
 DKI = Dewan Komisaris Independen
 ROA = Profitabilitas
 ε = Error

1. Pengaruh Variabel Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber tabel 4.10, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai *unstandardized beta* positif 0,109 dengan tingkat signifikansi 0,031. Perihal ini memperlihatkan jika tingkat signifikansi variabel diatas 0,05, sehingga bisa didapatkan kesimpulan jikalau kepemilikan institusional berdampak positif pada *tax avoidance*. Perihal ini berbanding terbalik dengan hipotesis pertama ialah kepemilikan institusional berdampak negatif pada *tax avoidance*. Bersumber dari perihal ini, sehingga **hipotesis pertama ditolak**.

2. Pengaruh Variabel Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber dari tabel 4.10, variabel dewan komisaris independen mempunyai nilai *unstandardized beta* negatif -0,145 dan tingkat signifikansi 0,032. Perihal ini memperlihatkan jika tingkat signifikansi variabel diatas 0,05, sehingga bisa diperoleh simpulan jikalau dewan komisaris independen berdampak pada *tax avoidance*. Serta memiliki nilai beta negatif, maka sesuai

hipotesis kedua yakni dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*. Bersumber perihal ini, maka **hipotesis kedua diterima**.

3. Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber dari tabel 4.10, memperlihatkan jika moderasi profitabilitas mempunyai nilai *unstandardized beta* -0,307 dengan tingkat sig $0,506 > 0,05$. Perihal ini artinya profitabilitas tidak bisa memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Maka, **hipotesis ketiga ditolak**.

4. Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber tabel 4.10, memperlihatkan jika moderasi profitabilitas mempunyai nilai *unstandardized beta* 1,925 dan tingkat signifikansi sejumlah 0,006. Perihal ini artinya profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen pada *tax avoidance*. Hingga, **hipotesis keempat diterima**.

4.3 Pembahasan Hasil Pengujian

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber dari uji hipotesis diketahui jika kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut tidak sesuai hipotesis pertama ialah kepemilikan institusional berdampak negatif pada *tax avoidance*, hingga **hipotesis pertama ditolak**.

Perihal ini berarti jikalau kepemilikan institusional dalam perusahaan makin tinggi, sehingga makin tinggi pula praktik penghindaran pajak dilaksanakan

perusahaan. Kepemilikan institusional bakal memberi insentif pada manajemen buat menurunkan pajak karena ini adalah bisnis yang mencari hasil terbaik atas investasinya dan ingin meningkatkan laba.

Dilihat pada PT Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2020 miliki nilai kepemilikan institusional yang paling tinggi yaitu 0,915239 dengan nilai ETR sejumlah 0,248622 serta mengalami kenaikan tahun 2021 sejumlah 0,263075. Sedangkan pada PT Garuda Food Tbk (GOOD) memiliki nilai kepemilikan institusional paling kecil atau minimum yaitu 0,465281 dengan nilai ETR sejumlah 0,291749 serta mengalami penurunan tahun 2021 yaitu 0,243077. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bila jumlah kepemilikan institusional makin tinggi sehingga potensi alami *tax avoidance* makin besar sehingga jumlah kepemilikan institusional kecil sehingga potensi alami *tax avoidance* akan makin kecil.

Kepemilikan institusional memiliki kecenderungan untuk hanya memaksimalkan kesejahteraan perusahaan, terutama dalam hal potensi pendapatan, yang berarti bahwa apa pun dapat merugikan perusahaan seperti penghindaran pajak akan didorong. Dengan demikian kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan kurang berperan dalam melaksanakan monitoring pada tindakan yang dilaksanakan pihak manajemen. Sehingga, tindakan penghindaran pajak tidak dapat dikontrol oleh pemilik saham institusi karena hanya akan berfokus pada investasinya agar investasinya lebih menguntungkan. Hingg ada tidaknya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan tetap terjalin tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian didukung Anita Wijayanti&Endang Masitoh (2018), dan Dewi N.M (2019) memiliki hasil jika kepemilikan institusional

berdampak positif pada *tax avoidance*. Tapi hasil ini bertolak belakang penelitian Hikmah&Sulistyowati (2020), Koming&Praditasari (2017) dan Oktaviani&Agus (2020) mengatakan jika kepemilikan institusional tidak berdampak pada *tax avoidance*.

4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber dari hasil uji hipotesis diketahui jika dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Berdasarkan adanya hasil uji hipotesis tersebut sesuai hipotesis kedua yakni dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*, hingga hipotesis kedua diterima.

Pada PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) tahun 2020 mempunyai nilai dewan komisaris independen sejumlah 0,250000 kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,400000 tahun 2022, dan nilai ETR sejumlah 0,296742 tahun 2020 dan alami penurunan pada 2021 sejumlah 0,246701. Hasil tersebut menandakan jika makin besar dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan sehingga makin menurun potensi terjadi penghindaran pajak dalam perusahaan. Sebaliknya, jikalau dewan komisaris independen makin kecil sehingga potensi adanya tindakan penghindaran pajak dilaksanakan perusahaan makin besar. Pada nilai mean dewan komisaris independen sejumlah 0,39123247 ataupun 39,1%, presentase ini lebih besar dari indikator nya yaitu 30%. Artinya perusahaan melaksanakan tata kelola dengan baik, adanya dewan komisaris independen, perusahaan bisa mengontrol serta mengendalikan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perihal ini memperlihatkan jika upaya perusahaan buat menghindari pembayaran pajak berkurang seiring dengan jumlah komisaris independen di dewan

direksi. Manajemen perusahaan akan diawasi dengan lebih baik dalam setiap keputusan yang dibuat ketika memiliki dewan komisaris independen. Untuk mengungkapkan beban pajak perusahaan secara adil dan mengurangi Tindakan *tax avoidance*, dewan komisaris independen pula bakal awasi manajemen perusahaan dalam patuhi peraturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Manajemen cenderung bakal lebih berhati-hati terhadap keputusan terkait perpajakan, sebab ada pengawasan dari komisaris independen yang lebih ketat. Oleh karna itu, kehadiran dewan komisaris independen bisa meningkatkan pengawasan dan kontrol, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan tindakan penghindaran pajak. Hasil ini didukung penelitian Chandra Y (2022), Dewi & Oktaviani (2021), dan Saputri&Husen (2020), dalam hasil penelitiannya menyatakan jika dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*. Tetapi hasil ini bertolak belakang dengan penelitian dilaksanakan Kusdiono&Prasasyaningsih (2021) dan Purbowati (2021) jika dewan komisaris tidak berdampak pada *tax avoidance*, jika makin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak menjamin semakin menurun tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan.

4.3.3 Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan Antara Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber dari uji hipotesis memperlihatkan jika profitabilitas tidak memoderasi hubungan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*, artinya profitabilitas tidak bisa memperkuat atau memperlemah hubungan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*.

Kepemilikan yang dipunyai institusi berperan sebagai pengawas agar tindakan yang mungkin dilaksanakan manajer perusahaan bisa dicegah. Dengan adanya profitabilitas yang tinggi sebabkan beban pajak yang tinggi perihal ini bisa memunculkan motivasi perusahaan buat lakukan tindakan penghindaran pajak, oleh karena itu diperlukan pengawasan juga dari pihak eksternal agar dapat memantau, mendisiplinkan kinerja dari manajer. Namun, pada hasil pengujian yang dilakukan tidak membuktikan bahwa dengan adanya profitabilitas yang tinggi dapat mendorong pemilik saham institusi untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajer termasuk dalam mencegah tindakan *tax avoidance*. Pemilik dari saham institusi tidak hanya fokus pada profit yang dihasilkan oleh perusahaan saja, tetapi pada kekuatan manajerial serta kondisi industri dan pasar, serta menilai risiko yang terlibat dan bagaimana saham tersebut sesuai dengan strategi investasi mereka.

Hal ini disebabkan juga karena pada pelaksanaannya pemilik saham institusi lebih percayakan pengawasan beserta pengelolaan atas perusahaan pada dewan komisaris sebab jadi salah satu tugas dari dewan komisaris untuk melaksanakan pengawasan termasuk pada pengelolaan pajak perusahaan. Serta pemilik saham institusi lebih berfokus pada return yang dihasilkan dari saham institusi yang ditanamkan diperusahaan daripada profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu dikatakan jika profitabilitas tidak bisa memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

4.3.4 Pengaruh Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Bersumber dari hasil uji hipotesis perlihatkan jika profitabilitas memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen pada *tax avoidance* artinya profitabilitas bisa memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara dewan komisaris independen pada *tax avoidance*, hingga hipotesis keempat diterima.

Pada teori agensi menjelaskan konflik antara pemilik perusahaan (prinsipal) serta manajer (agen) terkait kepentingan masing-masing. Dewan komisaris independen membantu mengurangi konflik dengan mengawasi keputusan manager, termasuk terkait dengan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen memastikan bahwa strategi pajak perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan prinsip transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko penghindaran pajak yang agresif.

Jika profitabilitas tinggi, dewan komisaris independen memiliki pengaruh lebih signifikan dalam mengurangi tingkat *tax avoidance* dalam perusahaan. Dewan komisaris independen akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk mengurangi tindakan penghindaran pajak, termasuk jika perusahaan memiliki profit yang terus menerus naik maka dewan komisaris akan memiliki peran yang penting didalamnya. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang meningkat cenderung lebih memperhatikan reputasi dan risiko yang terjadi termasuk dalam pengelolaan pajak. Sebaliknya jika perusahaan dengan profitabilitas rendah, pengaruh dewan komisaris independen mungkin tidak sekuat pada perusahaan yang lebih

menguntungkan, karena salah satu syarat menjadi perusahaan baik adalah membayar kewajiban termasuk pajak. Oleh sebab itu, bisa dikatakan jika profitabilitas memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen pada *tax avoidance*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian bermaksud buat ketahuai pengaruh *corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen pada *tax avoidance* dengan profitabilitas selaku variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman terdaftar di BEI periode 2020-2022. Bersumber dari hasil pengujian menggunakan bantuan *software* SPSS versi 26, sehingga bisa diambil kesimpulan:

1. Hasil penelitian memperlihatkan jika *corporate governance* yang diproksikan kepemilikan institusional berdampak positif pada *tax avoidance*. Hasil ini didukung Anita Wijayanti&Endang Masitoh (2018) serta Dewi N.M (2019), hasil ini berlainan dengan penelitian dilaksanakan Hikmah&Sulistiyowati (2020), Koming&Praditasari (2017) dan Oktaviani&Agus (2020).
2. Hasil penelitian memperlihatkan jika *corporate governance* yang diproksikan dewan komisaris independen berdampak negatif pada *tax avoidance*. Hasil ini sesuai penelitian Chandra Y (2022) dan Saputri&Husein (2020) , hasil ini berlainan dengan penelitian dilaksanakan Kusdiono&Prasasyaningsih (2021) dan Purbowati (2021).
3. Hasil penelitian memperlihatkan jika profitabilitas tidak bisa memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional pada *tax avoidance*.
4. Hasil penelitian menunjukkan jika profitabilitas bisa memoderasi hubungan antara dewan komisaris pada *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan

Penulis sadari jika penelitian ini tidak dapat terlepas dari adanya kekurangan. Adapun keterbatasan terdapat pada penelitian ini yang mungkin bisa menyebabkan ketidakakuratan pada hasil penelitian:

1. Pada tabel koefisien determinasi, miliki nilai Adjusted R Square yang kecil yakni 0,108. Jadi variabel dependen cuma bisa dijelaskan 10,8% saja oleh variabel independen dan variabel pemoderasi.
2. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak miliki kepemilikan institusional hanya memiliki kepemilikan manajerial dan kepemilikan individu
3. Pada tahun 2020 terdapat banyak perusahaan yang alami kerugian ataupun laba negatif yang mengakibatkan sampel penelitian berkurang.

5.3 Saran

Penelitian ini dilaksanakan buat mengetahui pengaruh *corporate governance* diproksikan kepemilikan institusional serta dewan komisaris independen pada *tax avoidance* beserta profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Peneliti berharap bahwa penelitian yang bakal dilaksanakan selanjutnya sesuai topik penelitian menghasilkan penelitian yang lebih baik dengan adanya saran pada beberapa perihal yakni:

1. Peneliti selanjutnya disaran buat tambahkan variabel independen lain yang bisa pengaruhi variabel *tax avoidance* semacam *leverage*, intensitas modal, dan lain sebagainya, agar nilai dari Adjusted R Square lebih besar dari yang sebelumnya.
2. Peneliti selanjutnya disarankan buat memperluas populasi dan sampel penelitian, semacam sektor pertambangan, *real estate*, serta lainnya .

3. Peneliti selanjutnya disarankan buat menambah tahun penelitian supaya hasil penelitian lebih akurat serta konsisten dari variabel-variabel yang digunakan.
4. Bagi perusahaan diharapkan untuk tidak berfokus saja dalam menghasilkan laba tapi harus berfokus pada pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, serta bagaimana kondisi industri dan pasar perusahaan.
5. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perusahaan terutama pada perusahaan yang mempunyai laba atau profit yang tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1884. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 – 2020). *Akuntoteknologi*, 14(1 SE-Articles), 89–102. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/1444>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 13–22. www.ajhssr.com
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 172–189.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 5(2), 101–112.
- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31–43.
- Hikmah, N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitability, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 12(1), 1–19.
- Irton, I., Fauzan, A., Purwanto, M. I., Purwanto, K., & Rezkyani, N. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, and Liquidity on Tax Avoidance. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and*

Technology (IJESET), 1(5), 334–345.
<https://doi.org/10.55983/ijeset.v1i5.350>

Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122.
<https://doi.org/10.2308/accr-51529>

Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 103–112.

Kusdiono, F. P., & Prasasyaningsih, X. I. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governancedan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 241–253.

Lumbanraja, T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen)*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>

Maryati, & Tarmizi, M. I. (2015). Pemahaman dan Persepsi Etis Akuntan Pajak tentang Tax Avoidance dan Tax Evasion. *SNA 18 Medan*, 1–23.

Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
<https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>

Oktaviani, F., & Agus, Y. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Karya Ilmiah Online Universitas Trisakti*.

Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>

Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>

- Putra, I. G. C., Manuari, I. A. R., & Puspayanti, N. K. D. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 105–118. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.105-118>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahayu, A. P., Wibowo, A. S., & Oktavia, R. (2020). Good corporate governance , profitability , dan tax avoidance di bursa efek indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1), 1–36. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26573.59360>
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 09(01), 1–10. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Insitusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6*, 1(1), 5.10.1-5.10.8.
- Saputri, I., & Husen, S. (2020). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 23.
- Setiawan, R., & Syarif, M. M. (2019). Kepemilikan Institusional, Kinerja Perusahaan, dan Efek Moderasi dari Kepemilikan Institusional Aktif. *Business and Finance Journal*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.33086/bfj.v4i1.1095>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Yusuf, M., Herawati, H., & Yulianti, H. (2021). Pengaruh Corporate Gorvenance Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 44–57.